

UPAYA SEKURITISASI POLANDIA TERHADAP PENCARI SUAKA

ASAL TIMUR TENGAH PADA TAHUN 2015-2018

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MAHENDRA APRILIANTO DARU PRABOWO

21323165

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

UPAYA SEKURITISASI POLANDIA TERHADAP PENCARI SUAKA

ASAL TIMUR TENGAH PADA TAHUN 2015-2018

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MAHENDRA APRILIANTO DARU PRABOWO

21323165

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Sekuritisasi Polandia Terhadap Pencari Suaka
Asal Timur Tengah Pada Tahun 2015-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 3 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 4 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Aprilianto Daru Prabowo
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 06 April 2025
Alamat : Pondok Bambu Kuning f4/24 RT. 12 RW. 14, Bojonggede, Kab. Bogor
NIM : 21323165
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 November 2025



Mahendra Aprilianto Daru Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>14</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 PERSOALAN PENCARI SUAKA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH POLANDIA 2015-2018.....	16
2.1 Pencari Suaka di Polandia.....	16
<i>2.1.1 Sebelum Krisis Pencari Suaka tahun 2015.....</i>	<i>16</i>
<i>2.1.2 Sikap Setelah Krisis Pencari Suaka Tahun 2015</i>	<i>19</i>
2.2 Krisis Pencari Suaka Timur Tengah di Polandia (2015-2018)	25
<i>2.2.1 Ketegangan Sosial dan Polarisasi Masyarakat.....</i>	<i>25</i>
<i>2.2.2 Peran Media Domestik.....</i>	<i>27</i>
<i>2.2.3 Kebijakan Negara dan Respon Keamanan.....</i>	<i>31</i>
BAB 3 SEKURITISASI POLANDIA TERHADAP PENCARI SUAKA ASAL TIMUR TENGAH	34
3.1 <i>Securitizing Actors dan Functional Actors</i>.....	34
<i>3.1.1 Securitizing Actors</i>	<i>34</i>

3.1.2	<i>Functional Actors</i>	36
3.2	<i>Referent Objects</i> dalam Narasi Keamanan Polandia.....	39
3.3	<i>Speech Act: Retorika Ancaman</i> oleh Elit Politik Polandia.....	42
3.4	<i>Existential Threat, Breaking Free of Rules</i> dan <i>Emergency Measure</i>....	45
3.4.1	<i>Existential Threat</i>	45
3.4.2	<i>Emergency measure dan breaking free of rules</i>	47
BAB 4	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Emigran Polandia Tahun 2000-2019	17
Grafik 2 Jumlah Imigran yang Datang ke Polandia Tahun 2000-2019.....	18
Grafik 3 Jumlah Artikel Terkait Migran di Media Polandia pada Tahun 2015-2018	29

DAFTAR SINGKATAN

ABW	: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CEAS	: Common European Asylum System
CNN	: Cable News Network
CNBC	: Consumer News and Business Channel
DW	: Deutsche Welle
EDRi	: European Digital Rights
EU / UE	: European Union / Uni Eropa
GW	: Gazeta Wyborcza
GPC	: Gazeta Polska Codziennie
KORWiN	: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
MW	: Młodzież Wszechpolska
ODF	: Open Dialogue Foundation
ONR	: Obóz Narodowo-Radykalny
PAH	: Polish Humanitarian Action
PiS	: Prawo i Sprawiedliwość
TFEU	: Treaty on the Functioning of the European Union
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi terhadap pencari suaka asal Timur Tengah pada periode 2015-2018. Polandia memandang bahwa arus pencari suaka, khususnya yang dari Timur Tengah, bukan sekedar persoalan kemanusiaan, tetapi menjadi ancaman keamanan dan identitas nasional. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana suatu isu dapat dikonstruksikan sebagai ancaman oleh aktor negara. Argumen sementara dalam penelitian ini adalah pemerintah Polandia membentuk konstruksi keamanan akibat kekhawatiran akan datangnya para pencari suaka yang dapat merusak Polandia menggunakan sekuritisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekuritisasi benar-benar terjadi melalui tujuh elemen sekuritisasi, yang tercermin dari retorika politik yang membingkai pencari suaka sebagai ancaman bagi negara dan bangsa Polandia, pembingkai tersebut diterima oleh audiens sehingga melegitimasi aktor sekuritisasi untuk mengambil langkah penolakan terhadap kebijakan relokasi pencari suaka yang ditetapkan oleh Uni Eropa, dengan menolak relokasi maka langkah tersebut telah melanggar aturan yang seharusnya disepakati oleh Polandia.

Kata Kunci: *sekuritisasi, polandia, pencari suaka, timur tengah, keamanan, krisis*

ABSTRACT

This research discusses how the Polish government securitized asylum seekers from the Middle East during the period 2015-2018. Poland viewed the influx of asylum seekers, especially those from the Middle East, not merely as a humanitarian issue, but as a threat to national security and identity. The framework used in this study is the theory of securitization by Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde. This theory helps explain how an issue can be constructed as a threat by state actors. The provisional argument in this study is that the Polish government formed a security construct due to concerns that the arrival of asylum seekers could damage Poland by using securitization. The findings show that securitization did indeed occur through seven elements of securitization, reflected in political rhetoric that framed asylum seekers as a threat to the Polish state and nation. This framing was accepted by the audience, thereby legitimizing the securitizing actors to take steps to refuse the asylum seeker relocation policy established by the European Union. By rejecting relocation, this move violated the rules that Poland was supposed to agree to.

Key Words: *securitization, poland, asylum seeker, middle east, security, crisis*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena *Arab Spring* yang terjadi lebih dari satu dekade lalu diyakini merupakan penyebab terjadinya krisis pencari suaka besar-besaran yang terjadi di Eropa. Kondisi dalam negeri negara-negara Timur Tengah yang tidak stabil dengan dipenuhi banyak unjuk rasa dan keributan oleh bermacam gerakan sosial untuk menumbangkan pemerintahan yang ada memberikan rasa ketidakamanan dan ancaman hidup bagi masyarakat. Seperti Perang sipil yang sedang berlangsung di Suriah pada tahun 2011, peristiwa tersebut yang dimulai dari gerakan sosial untuk mengkritik pemerintah berakhir menjadi perang sipil, konflik tersebut telah menghasilkan sebanyak 4 juta jiwa mengungsi dari Suriah hingga tahun 2015, hal ini menjadikan jumlah pencari suaka asal Suriah menjadi pencari suaka dengan jumlah terbesar yang terjadi akibat satu konflik (Lydia Tomkiw 2015).

Kondisi yang relatif stabil dan pemberian jaminan sosial yang layak di Eropa menjadi alasan mengapa sebagian besar para pencari suaka yang datang dari kawasan Timur Tengah memilih Eropa sebagai tempat tujuan mereka mencari perlindungan, ditambah menurut Zuhairi Misrawi, seorang pengamat Timur Tengah yang mengatakan bahwa perlakuan warga Eropa dan Amerika Serikat lebih bersahabat dan lebih menarik daripada perlakuan tetangga negara mereka di Timur Tengah (Hanna Azarya Samosir 2015). Hal ini mencerminkan rasa bertanggung jawab yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam memberikan perlindungan bagi siapapun mereka yang membutuhkan seperti yang tercatat pada *European Union Charter of*

Fundamental Rights pasal 18 yaitu “*The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 ...*” (“Charter of Fundamental Rights of The European Union” 2000).

Eropa yang menjadi tujuan prioritas para pencari suaka pada akhirnya mengalami krisis pencari suaka pada tahun 2015. Menurut *Eurostat* terjadi lonjakan jumlah pencari suaka yang datang ke Eropa dari yang sebelumnya hanya 435.190 pencari suaka pada tahun 2013 meningkat sebanyak 190.875 menjadi 626.065 pencari suaka dalam kurun waktu setahun, dengan mayoritas pencari suaka berasal dari Suriah sebanyak 362.775 jiwa , Irak 121.535 jiwa, dan Iran 25.360 (Eurostat 2015). Hingga pada puncaknya pada tahun 2015 sekitar 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1.225.640 pencari suaka yang datang ke Uni Eropa (Eurostat 2016).

Peristiwa krisis pencari suaka Uni Eropa pada tahun 2015 membuat Uni Eropa menerapkan solusi pemerataan penerimaan pencari suaka dengan membaginya ke negara-negara anggota melalui kebijakan *Council Decision* (EU) 2015/1601. Berdasarkan kebijakan tersebut, Uni Eropa membagi jumlah pencari suaka ke negara-negara anggota berdasarkan jumlah penduduk, produk domestik bruto, rata-rata pemohon suaka yang diterima dalam periode 2010-2014, dan tingkat pengangguran negara tersebut. Metode tersebut disebut sebagai *relocation key*, berdasarkan demikian Polandia ditetapkan untuk menerima 7.000 pencari suaka (Costello, Guild, dan Moreno-Lax 2017). Ketika masa kepemimpinan Ewa Kopacz yang berasal dari sebuah partai konservatif-liberal yaitu Partai *Civic Platform*, Polandia menyepakati kesepakatan untuk melakukan kebijakan bersama dalam

menyikapi krisis pencari suaka dengan menyetujui menerima 7.000 dari 160.000 pencari suaka yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa (Cienski 2016).

Polandia selaku anggota Uni Eropa tentunya harus mendukung dan menaati hukum-hukum yang berlaku dalam Uni Eropa, salah satunya adalah menaati kesepakatan *Council Decision* (EU) 2015/1601. Menurut Artikel nomor 78 pada Pakta Lisbon yang membahas *Common European Asylum System* (CEAS), dijelaskan bahwa seluruh anggota Uni Eropa harus mendukung dan menaati program upaya pemerataan jumlah pencari suaka dengan cara menampung di negaranya.

Namun, masa transisi pemerintahan Polandia pada pemilu 2015 membuat sikap Polandia terhadap penerimaan pencari suaka berubah drastis. Fenomena penolakan yang terjadi oleh Polandia terjadi ketika Partai sayap kanan *Prawo i Sprawiedliwość* atau Partai *Law and Justice* memenangkan pemilihan di Polandia pada tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 37% dari seluruh pemilih (Deloy 2015). Kemenangan partai ini mereka mengubah alur pemetaan politik pemerintahan Polandia dalam menghadapi pencari suaka asal Timur Tengah. Partai ekstrem kanan ini menyampaikan ketegasannya dengan menolak resolusi Uni Eropa *Council Decision* (EU) 2015/1601 (Reuters 2015a).

Pandangan Polandia terhadap pencari suaka khususnya yang berasal dari Timur Tengah kian meningkat selepas terjadinya kasus serangan terorisme yang terjadi di Paris pada 13 November 2015. Polandia merasa jika tidak ada jaminan keamanan dari Uni Eropa maka para pencari suaka tidak dapat diterima karena dapat mengancam keamanan nasional Polandia (Reuters 2015a). Meskipun dengan segala sentimen yang telah timbul terhadap pencari suaka yang berasal dari Timur

Tengah, Polandia melalui Dominik Tarczynski yang merupakan dewan parlemen dari partai Law and Justice menyampaikan bahwa penolakan terjadi bukan karena latar belakang agama maupun suku, melainkan kesadaran akan menjaga kestabilan keamanan nasional (Al Jazeera 2019).

Polandia menolak menerima kuota pencari suaka secara utama didasari oleh kekhawatiran akan dampak terhadap keamanan nasional. Pemerintah Polandia merasa kebijakan Uni Eropa dalam menampung pencari suaka tidak memperhatikan aspek keamanan. Oleh demikian, mereka menerima penerimaan jumlah pencari suaka dalam jumlah besar dapat mengancam stabilitas negara. Politisi Partai *Law and Justice* menyampaikan bahwa Polandia bersedia menerima pencari suaka sesuai dengan kuota yang telah diterapkan Uni Eropa, namun dengan syarat bahwa Polandia diberikan jaminan keamanan yang jelas dan langsung dari Uni Eropa (CNBC 2015).

Solidaritas antara anggota Uni Eropa dipertanyakan pada saat Polandia dikatakan sebagai negara yang membangkang pada hukum Uni Eropa terkait relokasi pencari suaka. Mahkamah Eropa tegas menyatakan bahwa Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko telah melanggar hukum terkait pemerataan pencari suaka di Uni Eropa, dengan demikian Mahkamah Eropa menetapkan bahwa negara tersebut tetap harus mengakomodir pencari suaka sesuai kepada hukum yang telah diratifikasi negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa (Jennifer Rankin 2020).

Polandia selaku negara yang menolak serta menerapkan kebijakan tersendiri untuk menekan laju kedatangan para pencari suaka di negaranya menganggap desakan Uni Eropa dalam tanggung jawab menerima pencari suaka sebagai gangguan terhadap kedaulatan Polandia (Denny Armandhanu 2016). Sebelum

fenomena krisis ini terjadi, Polandia adalah sebuah negara yang dapat dianggap ramah kepada para pencari suaka ataupun imigran yang mengajukan izin tinggal maupun izin untuk keperluan bekerja. Tahun 2002 hingga 2012 menjadi penelitian bagi sebuah Lembaga survey yaitu *European Social Survey* yang memperlihatkan Polandia merupakan negara yang setuju dengan datangnya pencari suaka di Eropa (Bart Bachman 2016). Polandia pada tahun 2011 sendiri telah menampung 227,5 ribu jiwa yang berasal dari negara tetangganya yaitu Ukraina, diikuti oleh Jerman yang menerima sebanyak 84 ribu, Belarus dengan penerimaan sebanyak 83,4 ribu dan Lithuania yang menerima sebanyak 55,6 ribu jiwa (Kaczmarzyk 2014).

Tahun 2018 ketika Polandia mengalami permasalahan terkait ketenagakerjaan menyebabkan perubahan pada kebijakan imigrasi serta penerimaan pencari suaka. Pada fenomena ketenagakerjaan ini Polandia mengalami penurunan luar biasa pada tingkat pengangguran yang mencapai titik terendah sejak tahun 1990, dengan terjadinya hal demikian memberikan efek upah yang tinggi dan menimbulkan inflasi. Disebabkan oleh kekhawatiran akhirnya pemerintah Polandia memutuskan memberikan kelonggaran dan lebih membuka akses perbatasannya dari luar Uni Eropa. Langkah ini diambil untuk mengatasi isu dalam negeri mereka terkait permasalahan tenaga kerja serta perekonomian Polandia (Jo Harper 2018).

Fenomena tersebut kian menarik, apabila dilakukan analisis melalui perspektif sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. Hadirnya sebuah ancaman baik tradisional maupun non-tradisional, dapat mengarahkan pandangan politik sebuah negara secara dinamis. Tidak bisa dikesampingkan bahwa fenomena migrasi global adalah fenomena yang perlu dipahami dan dilakukan analisis pada kajian keamanan global. Penelitian ini memiliki signifikansi sebab tingginya

kepekaan warga Eropa kepada imigran asal Timur Tengah telah mengakibatkan konflik sosial di berbagai belahan masyarakat. Memahami keadaan bangsa dan tahapan sekuritisasi yang terjadi dapat membantu memahami mengapa pencari suaka asal Timur Tengah dapat dianggap sebagai ancaman bagi suatu negara. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan guna menganalisis langkah pemerintah Polandia dalam mengambil kebijakan terhadap pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah dengan menggunakan teori sekuritisasi. Teori ini penting untuk dipahami supaya kita dapat mengetahui perspektif negara sebagai pelaku sekuritisasi dalam merancang kebijakannya. Namun demikian, kerap kali klaim kepentingan dalam negeri tidak pasti sejalan dengan keamanan regional maupun global.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi terhadap pencari suaka asal Timur Tengah pada periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan sebelumnya telah menyajikan latar belakang serta rumusan masalah sehingga penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana pemerintah Polandia membingkai kedatangan pencari suaka asal Timur Tengah sebagai ancaman keamanan nasional pada tahun 2015-2018.
2. Menganalisis upaya sekuritisasi pemerintah Polandia sebagai respon atas pembingkaiian keamanan terhadap pencari suaka asal Timur Tengah.

1.4 Cakupan penelitian

Riset ini memiliki fokus dalam menganalisis kebijakan pemerintah Polandia dalam menanggapi krisis pencari suaka yang sedang berlangsung di Uni Eropa tahun 2015 hingga 2018, dengan memanfaatkan pendekatan sekuritisasi. Fokus penelitian dimulai pada tahun 2015 karena pada masa ini merupakan puncak krisis pencari suaka Uni Eropa, ketika lebih dari 1 juta pencari suaka memasuki Uni Eropa sehingga menjadi pemicu awal konstruksi keamanan terhadap pencari suaka oleh pemerintah Polandia. Kemudian, tahun 2018 menjadi titik akhir karena terjadinya perubahan kebijakan yang lebih cair bagi para imigran serta berkurangnya signifikansi sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Polandia, didasari terjadinya isu ketenagakerjaan yang terjadi di Polandia. Pada linimasa ini penelitian akan berfokus pada bagaimana pemerintahan Polandia melakukan upaya sekuritisasi yang kala itu di bawah kepemimpinan Andrzej Sebastian Duda selaku kepala negara. Sehingga penelitian akhirnya akan mengulas kebijakan terkait imigrasi Polandia pada era presiden Andrzej Duda melalui pendekatan sekuritisasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Narkowicz menyatakan bahwa Polandia merupakan salah satu negara yang paling homogen dalam hal agama dan etnis di Eropa dengan sekitar 90% penduduknya beragama katolik. Penulis berpendapat bahwa penyebab masyarakat Polandia menolak pencari suaka dikarenakan homogenitas tersebut. Tetapi yang unik, Narkowicz menyampaikan setidaknya sebelum Perang Dunia ke-2 Polandia merupakan bangsa yang sangat beragam di Eropa dengan terdiri dari 30% etnis minoritas yang terdiri berbagai kalangan etnis, jauh sebelum Perang Dunia ke-2 penulis juga memberikan keterangan bahwa bangsa Polandia pada masa lalu sekitar

abad ke-16 merupakan sebuah bangsa yang beragam dengan menyebutkan Polandia sebagai “rumah” bagi komunitas Yahudi and Muslim. Penelitian ini menyebutkan terdapat kekhawatiran terhadap pencari suaka yang akan menjadi musuh dalam selimut ketika diberi tempat di Polandia, sehingga memang terdapat juga pemikiran yang negatif terhadap para pencari suaka dari masyarakat Polandia itu sendiri. Dalam hasil penelitiannya, penulis menyatakan bahwa penolakan terhadap imigran yang berasal dari Timur Tengah tidak terbatas pada salah satu agama tertentu maupun ras tertentu, tetapi yang dikhawatirkan adalah kedatangan para pencari suaka yang tidak jelas latar belakangnya (Narkowicz 2018).

Penelitian berikutnya karya Kowalski, sebuah penelitian dengan tujuan untuk menyajikan dan memperjelas perspektif Polandia pada krisis pencari suaka. Hal menarik yang terdapat dalam penelitian ini ketika penulis menyebutkan bahwa sifat Polandia terbentuk akibat Perang Dunia ke-2 serta keputusan Negara-negara Besar ketika masih dalam Tirai Besi. Hal tersebut yang disebut penulis menjadi penyebab Polandia menjadi sangat bersifat Homogen serta kehadiran pencari suaka secara singkat dan dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran sosial yang serius. Dalam penelitian ini, penulis mengatakan bahwa Polandia mengalami kesalahpahaman antara pencari suaka dengan para migran. Kesalahpahaman tersebut membuat Polandia menjadi tidak efektif dalam menghadapi masalah pencari suaka (Kowalski 2016).

Jaskułowski menyatakan timbulnya sebuah ancaman nasional di Polandia akibat krisis pencari suaka disebabkan latar belakang sejarah Polandia sehingga timbul sifat atau karakter nasionalisme serta islamofobia di kalangan masyarakat. Penjelasan mendetail terhadap kondisi yang terjadi di Polandia terkait migrasi,

meskipun masyarakat Polandia tidak enggan dengan kehadiran pencari suaka selama mereka memenuhi persyaratan tetapi tetap tertanam di persepsi mereka tentang islamofobia kepada para pencari suaka. Penelitian ini mengulas delima terkait kebijakan Polandia terhadap krisis pencari suaka di antara kekhawatiran serta empati terhadap pencari suaka secara lebih detail (Jaskułowski 2018).

Penelitian di atas yang telah mengurai pembahasan terkait sikap dan langkah Polandia terhadap pencari suaka, beberapa penelitian di atas memiliki keidentikan terkait sifat serta sejarah bangsa Polandia terhadap isu krisis pencari suaka ini. Namun dalam penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana pemerintah Polandia mengkonstruksi kedatangan pencari suaka asal Timur Tengah sebagai ancaman eksistensial melalui kerangka teori sekuritisasi, bagaimana konstruksi keamanan tersebut diterima publik sehingga memberi legitimasi politik, dan bagaimana pemerintah Polandia mengambil langkah kebijakan luar biasa. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan teori sekuritisasi untuk menganalisis secara konkret bagaimana pemerintah Polandia mengkonstruksi, memobilisasi, dan menindaklanjuti narasi ancaman terhadap pencari suaka asal Timur Tengah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Sekuritisasi yang digagaskan oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta Jaap de Wilde akan menjadi teori yang menganalisis serta menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini, dengan menggunakan gagasan mereka dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Teori Sekuritisasi hadir pada dekade tahun 1990-an dengan kontroversi diantara para kalangan parah ahli yang pada kala itu sebagian

besar berpandangan terkait keamanan hanya dalam sudut pandang tradisional, sedangkan sebaliknya teori ini memberikan perspektif baru yaitu non-tradisional, di mana bahwa isu keamanan tidak hanya berdasar pada ancaman militer, tetapi ancaman dapat timbul dari berbagai hal seperti ekonomi, lingkungan, serta budaya. Inti utama teori ini adalah bagaimana menelaah kehadiran suatu ancaman (*threat*). Sekuritisasi mendapati sebuah masalah secara inter-subjektif, dalam pengaruh aktor yang berperan sebagai pemberi indikator ancaman, dan relatif (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Konsep sekuritisasi secara eksplisit oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde sebagai proses intersubjektif, di mana suatu isu menjadi persoalan keamanan ketika dibingkai sebagai *existential threat* oleh *securitizing actors* dan diterima oleh audiens sebagai suatu yang sah (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Gambaran nyata adalah ketika suatu aktor khususnya negara memandang suatu isu publik dan mengambil kebijakan berdasarkan isu tersebut yang telah digambarkan menjadi ancaman nyata hingga diperlukan tindakan serta menjustifikasi tindakan yang melampaui batas prosedur politik. Sebuah isu dapat dikatakan sekuritisasi ketika isu yang dianggap sebagai *existential threat* kepada *referent object* diterima oleh audiens sehingga memberikan legitimasi untuk mengambil tindakan darurat (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Buzan dkk menjelaskan terdapat beberapa elemen atau indikator dalam membentuk sekuritisasi, yaitu *speech act*, *referent objects*, *securitizing actors*, *functional actors*, *existential threat*, *emergency measure*, dan *breaking free of rules* (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Contoh nyata dari *speech act* salah satunya adalah pidato resmi seorang pejabat negara. Terlepas tepat atau tidak bahkan benar

dan salahnya suatu isu, apabila telah dideklarasikan secara sosial menjadi ancaman keamanan maka isu tersebut tetap dianggap sebagai ancaman keamanan untuk selamanya (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Referent objects merupakan suatu hal eksistensial yang dianggap terancam serta yang memiliki legitimasi untuk bertahan hidup (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Dapat diinterpretasikan bahwa *referent objects* adalah sesuatu yang harus dilindungi dari berbagai ancaman dengan adanya sebuah tindakan dari sebuah aktor. Sebagai contoh nyata dalam Brexit para politisi Inggris menjadikan ekonomi domestik Inggris terancam oleh regulasi ekonomi Uni Eropa, dan hal tersebut dijadikan justifikasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Securitizing actors merupakan sosok yang menyerukan bahwa objek referensi secara eksistensial berada dalam keadaan yang terancam. Tokoh-tokoh yang biasa menjalankan peran ini adalah pejabat politik, tokoh masyarakat, serta pemerintah. Terdapat penjelasan bahwa *securitizing actors* bisa saja menjadi *referent objects*, namun hal tersebut sangat jarang terjadi dikarenakan mereka biasanya mengamankan keamanan atas nama negara serta bangsa. Contoh yang telah disebutkan menjadi *securitizing actors* akibat mereka memiliki ruang publik, otoritas, dan legitimasi untuk menyampaikan sebuah isu sehingga membentuk persepsi publik (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Functional actors merupakan aktor yang terdapat pada suatu dinamika keamanan yang memberikan pengaruh pada *securitizing actors* serta *referent objects*. *functional actors* tidak berada dalam dua elemen tersebut, namun keberadaannya dapat memberikan pengaruh seperti contoh dalam kasus Amerika Serikat melawan terorisme media-media besar seperti FOX News dan CNN

memberikan pengaruh dengan memperkuat narasi bahwa dunia dalam ancaman terorisme global (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Existential threat merupakan persepsi atau sebuah anggapan pada suatu isu yang dianggap sebagai ancaman sehingga dibutuhkan sebuah tindakan dalam menghadapi ancaman tersebut. Pernyataan-pernyataan terkait ancaman yang disampaikan oleh aktor dalam *speech act* merupakan sebuah *existential threat* (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Sebagai contoh, *securitizing actors* menyampaikan bahwa hadirnya Muslim merupakan sebuah ancaman terorisme bagi bangsa dan negara Polandia.

Emergency measure merupakan tindakan yang diterapkan oleh *securitizing actors* untuk menindak *existential threat*. Penerapan *emergency measure* dilakukan oleh *securitizing actors* dalam upaya mencegah atau mengentaskan ancaman (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Contoh nyata bentuk *emergency measure* adalah ketika Amerika Serikat mengesahkan *Patriot Act* atas isu terorisme yang terjadi di Amerika Serikat.

Breaking free of rules yang merupakan tindakan oleh *securitizing actors* untuk melanggar atau mengingkari sebuah kesepakatan atau peraturan yang telah disepakati dengan alasan bahwa situasi kian mendesak sehingga tindakan demikian menjadi dibenarkan. *Breaking free of rules* diterapkan dalam menghadapi *existential threat* yang dianggap mengancam (Buzan, Waever, dan Wilde 1998).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, teori sekuritisasi akan menjadi cara untuk melakukan analisis langkah pemerintah Polandia pada krisis imigran yang terjadi di Uni Eropa. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman, tetapi juga menunjukkan proses politik di mana aktor negara

menggerakkan opini publik dan kebijakan untuk membenarkan tindakannya. Sekuritisasi kepada isu krisis imigran yang diawali dari kasus kemanusiaan menjadi isu yang dapat mengancam keamanan dalam negeri dinilai telah dilakukan oleh Pemerintah Polandia. Dengan demikian teori sekuritisasi menjadi alat analisis yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.7 Argumen Sementara

Pemerintah Polandia pada tahun 2015-2018 mengkonstruksi pencari suaka asal Timur Tengah sebagai ancaman nyata terhadap keamanan nasional, identitas sosial Katolik dan stabilitas sosial Polandia. Dengan *speech act* yang konsisten disampaikan oleh aktor-aktor politik yang membingkai pencari suaka sebagai risiko terjadinya terorisme dan gangguan terhadap identitas nasional, pemerintah berhasil membangun persepsi ancaman yang diterima oleh publik bahwa ancaman tersebut adalah nyata. Sehingga Pemerintah Polandia mendapatkan legitimasi untuk menerapkan kebijakan luar biasa, seperti penolakan terhadap mekanisme relokasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa, yang merupakan tindakan *breaking free of rules*. Dengan demikian, penolakan Polandia terhadap pencari suaka merupakan tindakan sekuritisasi yang terstruktur dan disengaja.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang melandaskan analisis serta memiliki sifat yang deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dirasa akan lebih efektif serta dapat memahami isu ini secara komprehensif sehingga penulis memilih jenis penelitian kualitatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pemerintah Polandia akan menjadi subjek penelitian ini. Serta objek yang terdapat dalam penelitian ini adalah sekuritisasi yang dilakukan pada imigran Timur Tengah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder akan menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen serta sumber-sumber yang berasal dari Internet. Metode pengumpulan data mencakup penelusuran literatur yang melibatkan buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi dari Uni Eropa, serta laporan-laporan daring yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahapan analisis akan dilakukan pada saat data relevan terhadap topik pembahasan telah terhimpun. Data yang telah terkumpul akan ditelaah untuk memastikan setiap bagian terdapat poin-poin penting yang merangkum setiap pembahasan. Ide-ide yang telah ditelaah dan terstruktur tersebut kemudian akan diklasifikasikan untuk dibahas lebih mendalam. Tahap terakhir melibatkan analisis dan interpretasi data, sehingga deskripsi yang disusun dapat menghasilkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 pada penelitian ini menjelaskan terkait latar belakang yang memiliki kaitan pada fokus pembahasan yaitu pemerintah Polandia memiliki kebijakan terkait para pencari suaka. Dalam bab ini merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, tujuan, lingkup bahasan, serta kerangka pemikiran terkait dengan teori sekuritisasi. Metode penelitian juga diterangkan dalam bab ini, di mana metode

yang digunakan adalah metode kualitatif, yang memanfaatkan data sekunder seperti buku, artikel jurnal, serta sumber-sumber dari internet.

Bab 2 akan mengulas persoalan pencari suaka yang terjadi di Polandia dimulai dari sejarah Polandia dalam menangani isu migrasi, retorika dan kebijakan oleh aktor politik, serta mengulas bagaimana dinamika isu imigran di Polandia.

Bab 3 akan menganalisis bagaimana sekuritisasi kepada para pencari suaka diterapkan dengan mengaitkan teori kepada pembahasan kasus. Dalam bab ini akan menjelaskan sekuritisasi yang dilakukan dengan *speech act*, *referent objects*, *securitizing actors*, *functional actors*, *existential threat*, *emergency measure*, dan *breaking free of rules*.

Bab 4 akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab rumusan masalah dengan menganalisis sekuritisasi kepada pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah.

BAB 2

PERSOALAN PENCARI SUAKA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

POLANDIA 2015-2018

Bab ini akan membahas mengenai persoalan pencari suaka dan dinamika kebijakan pemerintah Polandia dalam krisis pencari suaka yang terjadi. Pembahasan diawali dengan kondisi Polandia sebelum krisis pencari suaka tahun 2015 untuk melihat bagaimana sikap dan kebijakan imigrasi Polandia sebelum terjadi krisis pencari suaka. Dalam bab ini akan menyajikan bagaimana transisi Polandia setelah krisis pencari suaka terjadi saat perubahan struktur pemerintahan Polandia yang terjadi pasca pemilu di tahun yang sama ketika krisis pencari suaka terjadi, serta bagaimana krisis pencari suaka memperkuat narasi ancaman terhadap pencari suaka dari Timur Tengah. Penyajian terkait bagaimana keterlibatan aktor non-politik, media domestik dalam membentuk persepsi publik, serta langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Polandia sebagai respon terhadap isu pencari suaka.

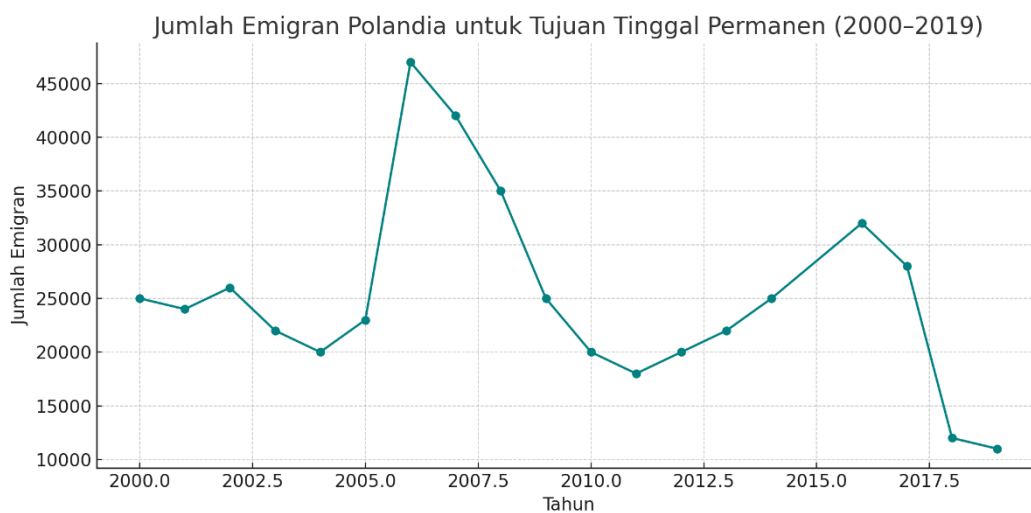
2.1 Pencari Suaka di Polandia

2.1.1 Sebelum Krisis Pencari Suaka tahun 2015

Polandia sebelum masa krisis pencari suaka yang melanda Uni Eropa pada tahun 2015 merupakan negara yang bukan menjadi tujuan utama para pencari suaka. Polandia yang dikenal dengan kebijakan imigrasinya yang bersifat tidak proaktif atau sangat terbatas dalam menangani pencari suaka dalam regionalnya. Polandia dianggap menjalankan kebijakan imigrasinya hanya sebagai pemenuhan kewajiban dasar sebagai anggota Uni Eropa.

Pada saat itu kelompok pencari suaka terbesar berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet, khususnya etnis Chechnya yang melarikan diri dari konflik di Kaukasus. Jumlah pencari suaka asal negara bekas Uni Soviet mendominasi sebanyak 40-90% setiap tahunnya, dengan mayoritas diantaranya adalah etnis Chechnya (Uchodzczy). Tidak ada sensus resmi yang dilakukan pemerintah Polandia sejak tahun 2002 terkait pencari suaka yang berasal dari daerah Timur, namun berdasarkan tahun tersebut terdapat sekitar 14.000-15.000 Jiwa dengan mayoritas berasal dari Iraq sebesar 10% (1.400-1.500), Afghanistan sekitar 4% (560-600), dan lainnya enggan menyebutkan detail mereka berasal (Jarecka-Stepień 2010).

Grafik 1 Jumlah Emigran Polandia Tahun 2000-2019

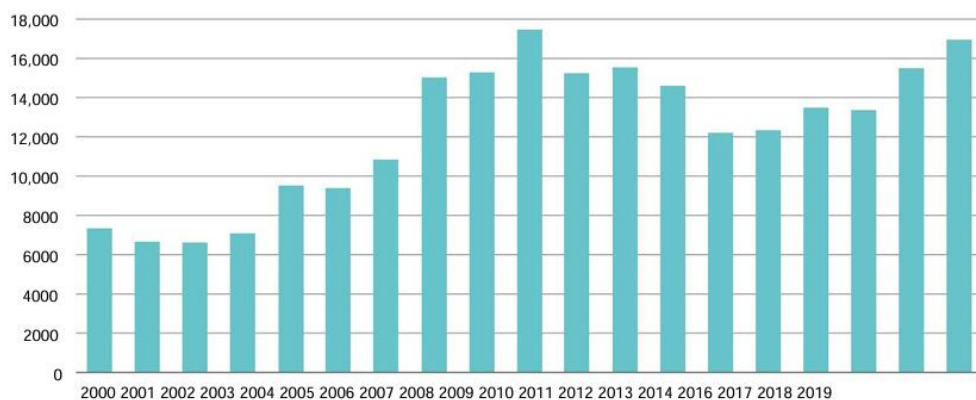


Sumber: (Kaczorowski dkk. 2020)

Polandia sendiri lebih dikenal sebagai negara yang memiliki nilai emigrasi yang tinggi. Berdasarkan grafik 1 menunjukkan data pada tahun 2000 hingga 2019 menunjukkan bahwa jumlah warga yang keluar dari Polandia untuk menetap secara permanen terus berfluktuasi, dan yang paling tertinggi hampir mencapai 50.000 orang pada tahun 2006. Emigrasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh integrasi

Polandia ke dalam Uni Eropa, banyak warga terutama kaum muda memanfaatkan kebebasan bergerak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di negara-negara anggota Uni Eropa yang terlebih dahulu. Dengan Jerman di awal dekade tahun 2000an menjadi negara paling dominan, lebih dari tiga perempat emigran menetap di sana (Kaczorowski dkk. 2020). Meskipun demikian, tren ini menunjukkan angka penurunan yang drastis pasca tahun 2016.

Grafik 2 Jumlah Imigran yang Datang ke Polandia Tahun 2000-2019



Sumber:(Kaczorowski dkk. 2020)

Ketika meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Polandia, menariknya sebagian besar dari mereka merupakan warga Polandia itu sendiri yang sebelumnya telah menetap di luar negeri, khususnya di negara-negara yang dulu menjadi tujuan utama emigrasi, Jerman salah satunya. Hal ini menunjukkan adanya pola balik migrasi, ketika warga diaspora Polandia kembali ke tanah air. Meningkatnya tren migrasi ke Polandia ternyata tidak selalu didominasi oleh pendatang asing, melainkan juga oleh masyarakat Polandia yang kembali dari perantauannya (Ziolek-Skrzypczak dan Iglicka 2010). Tren imigrasi untuk tujuan tinggal permanen di Polandia sejak tahun 2000 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009 dengan jumlah 17.400 orang dengan 90% diantaranya merupakan warga Polandia. Kembalinya warga Polandia bukan

juga tanpa sebab, akibat emigrasi besar yang terjadi Polandia memang memiliki masalah domestik dalam sektor tenaga kerja, sehingga pada periode 2007-2008 pemerintah meluncurkan kampanye yang menyerukan warga Polandia untuk kembali ke tanah air (Ziolek-Skrzypczak dan Iglicka 2010).

Namun, berdasarkan data dari Eurostat dilansir melalui Aljazeera pada tahun 2015 proporsi warga asing yang terdapat di Polandia hanya sekitar 0,1%, terendah di antara negara Uni Eropa lainnya (Natalia Ojewska 2015a). Dengan jumlah pencari suaka yang relatif sedikit, isu terkait pencari suaka tidak banyak muncul dalam benak publik Polandia sebelum 2015, dan berdasarkan data *European Social Survey* pada tahun 2002-2012 yang dikutip dari tulisan Bart Bachman menyatakan bahwa masyarakat Polandia memiliki pandangan positif terkait penerimaan imigran. Data tahun 2014 sebanyak 63,4% masyarakat Polandia setuju bahwa pemerintah mereka harusnya bermurah hati dalam menilai permohonan status pengungsi (Bart Bachman 2016).

2.1.2 Sikap Setelah Krisis Pencari Suaka Tahun 2015

Krisis pencari suaka tahun 2015 di Eropa, yang ditandai datangnya gelombang pencari suaka asal Timur Tengah, memaksa Uni Eropa menerapkan skema redistribusi pencari suaka demi solidaritas antarnegara. Pemerintah Polandia awalnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ewa Kopacz setuju secara terbatas menerima sekitar 7.000 jiwa dari kuota Uni Eropa sebanyak 160.000 orang (Cienski 2016). Namun, setelah partai nasionalis konservatif *Prawo I Sprawiedliwość* (PiS) berkuasa pada akhir 2015, sikap resmi Polandia berubah drastis. Polandia menolak menampung satu pun pencari suaka tambahan dengan

dalih keamanan, meskipun rencana relokasi tersebut telah disepakati mayoritas pemimpin Uni Eropa (Wintour 2017).

Penolakan yang dilakukan oleh Polandia utamanya adalah menolak skema relokasi pencari suaka Uni Eropa. Dewan Uni Eropa saat itu mengeluarkan *Council Decision* (EU) 2015/1601 pada September 2015, yang berdasarkan pasal 78(3) *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) dengan menetapkan relokasi sementara untuk para pencari suaka sebanyak 160.000 jiwa dari Italia dan Yunani ke negara anggota lain. Ketika kebijakan tersebut berlaku, Polandia berkewajiban untuk menerima 7.000 imigran sebagai bentuk solidaritas krisis kemanusiaan (European Council 2015). Namun, pemerintah Polandia menolak kewajiban ini dengan dalih perlindungan keamanan nasional, meskipun pasal 78(3) (TFEU) secara eksplisit mewajibkan negara anggota Uni Eropa untuk berbagi tanggung jawab dalam situasi darurat.

Pemerintah Polandia enggan mengakui mereka yang datang ke Eropa sebagai pencari suaka ataupun pengungsi sehingga dalam penelitian ini penting untuk membedakan secara jelas antara istilah pengungsi, pencari suaka, dan imigran. Pengungsi merupakan status yang didapat oleh individu ketika sudah mendapatkan pengakuan perlindungan internasional dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR 2006). Untuk mendapatkan status tersebut maka harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam definisi pengungsi menurut *1951 refugee convention 1961 protocol* merupakan

“... adanya ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, seseorang berada di luar negara kebangsaannya dan tidak

dapat atau, karena takut tersebut, tidak bersedia untuk kembali ke negaranya” (UNHCR 1961).

Sedangkan pencari suaka merupakan individu yang mencari perlindungan internasional. Di negara-negara dengan prosedur individual, seorang pencari suaka adalah seseorang yang permohonannya belum diputuskan secara final oleh negara tempat ia mengajukan permohonan tersebut. Tidak semua pencari suaka akan diakui sebagai pengungsi, namun setiap pengungsi pada awalnya adalah pencari suaka (UNHCR 2006). Definisi pengungsi dan pencari suaka tidak masuk dalam pandangan tokoh-tokoh politik Polandia, mereka menyatakan bahwa pencari suaka hanya datang untuk memperbaiki kondisi mereka dengan memanfaatkan sistem *welfare* yang ada di Eropa sehingga definisi yang tepat untuk pencari suaka sebenarnya adalah imigran (DW 2016).

Elit politik Polandia sejak tahun 2015 secara aktif melakukan berbagai seruan yang mengkonstruksi isu relokasi pencari suaka sebagai ancaman keamanan. Jarosław Kaczyński ketua PiS dan tokoh paling berpengaruh dalam partai PiS, dalam kampanye-nya saat pemilu tahun 2015 memperingatkan publik bahwa para pencari suaka membawa penyakit berbahaya seperti Kolera dan disentri, Kaczyński dalam orasinya mengatakan “*Migrants have already brought diseases like cholera and dysentery to Europe, as well as all sorts of parasites and protozoa*” dalam orasinya Kaczyński secara eksplisit bahwa itu akan datang ke Polandia dibawa oleh mereka yang dari Timur Tengah (Jan Cienski 2015). Seruan serupa juga timbul dari Presiden Polandia kala itu yaitu Andrzej Duda, pada Oktober tahun 2015 beliau menuntut agar pemerintah mengutamakan keamanan fisik, finansial, dan kesehatan warga Polandia (Al Jazeera 2015). Meskipun sudah bukan lagi anggota PiS namun

keterkaitan ideologi dan politik, ia sangat terkait erat dengan PiS, hal ini dikarenakan konstitusi Polandia yang mengharuskan sebuah presiden bersikap netral dan tidak terafiliasi oleh partai manapun, namun Andrzej Duda dalam masa jabatannya kerap kali menyerukan hal yang sama sebagaimana partai PiS.

Pada akhir tahun 2015 Perdana Menteri Beata Szydło menyatakan bahwa *“One cannot call attempts to export problems, which some countries have created without others”* sebagai bentuk kritiknya terhadap kebijakan relokasi Uni Eropa yang mempertanyakan definisi jelas apa itu prinsip solidaritas, beliau menyatakan berbagi masalah yang diciptakan sendiri bukan bentuk solidaritas (Reuters 2015b). Oktober tahun 2016 setelah peristiwa penyerangan di Brussel pada Maret 2016 secara tegas menyatakan *“I say very clearly that I see no possibility at this time of immigrants coming to Poland”*. Berdasarkan pernyataan demikian, Polandia menutup akses perbatasannya untuk para pencari suaka Timur Tengah, dilanjut dengan pernyataan juru bicara pemerintah Polandia yang menyatakan hingga adanya prosedur yang ketat terkait pemeriksaan latar belakang serta identitas imigran maka Polandia akan menolak kedatangan mereka (Cienski 2016). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Adam Smith Centre Poll* sebanyak 64% koresponden yang merupakan warga Polandia menyetujui langkah Pemerintah untuk menutup perbatasan Polandia untuk para imigran (Wprost 2016).

Menurut penuturan para pejabat pemerintah Polandia hal yang mereka lakukan ini adalah bentuk perlindungan terhadap keamanan masyarakat Polandia, sebagaimana yang mereka katakan bahwa *“The priority of the government is the safety of Poles.”* (Cienski 2016). Juru bicara pemerintah yang juga mengatakan *“We cannot allow a situation to develop whereby the events that are now happening in*

Western Europe spread to Poland,” pernyataannya mengisyaratkan bahwa kekhawatiran serangan teror yang terjadi di Paris dan Brussel tidak terjadi di Polandia guna melindungi keamanan warga Polandia (Damien Sharkov 2016).

Retorika politik Polandia pada era kepemimpinan tokoh-tokoh PiS secara konsisten menggambarkan pencari suaka Muslim sebagai ancaman mematikan terhadap keamanan nasional, budaya, dan ekonomi Polandia. Kaczyński kerap kali mengatakan kepada publik bahwa imigran Muslim akan memaksakan syariat Islam di Polandia, bahkan dalam pernyataannya secara spesifik beliau mengatakan bahwa Muslim akan menggunakan gereja sebagai kamar mandi (Jan Cienski 2015). Berbagai narasi resmi juga diutarakan oleh tokoh-tokoh PiS yang kerap menyatakan bahwa para imigran Timur Tengah sebagai “orang asing” dengan “niat buruk” yang dianggap akan melakukan tindakan terorisme dan kriminalitas di Polandia (Polko 2025). Para imigran Muslim ini dianggap sebagai manusia yang tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Polandia, belum lagi tingginya tingkat imigran yang merupakan laki-laki muda, mereka mengasosiasikan dengan pelaku kekerasan (Polko 2025).

Witold Waszczykowski selaku Menteri Luar Negeri menggunakan metafora sejarah untuk menyentuh simpati publik. Dalam wawancara media, ia menekankan bahwa relokasi imigran menimbulkan konotasi politis yang buruk. Hal ini karena seolah mengembalikan peristiwa pemindahan paksa ke Siberia dan pengusiran pada era Perang Dunia 2. Waszczykowski menambahkan

“We don’t want Poland to become one big camp for people to spend their lives protected and guarded behind fences. Migration into a country should be voluntary.” (Ivan martin 2017).

Menteri Dalam Negeri Mariusz Błaszczak dan juru bicara pemerintah kerap mengulang narasi-narasi ancaman terkait pencari suaka di media (Wintour 2017). Sebagaimana pernyataan Błaszczak yang bertanggung jawab akan keamanan dalam negeri Polandia sehingga membenarkan tindak penolakan relokasi dengan mengatakan

“There were no terror attacks in Poland because Poland has backed out of a decision that was taken by previous government to accept thousands of migrants called refugees.” (Reuters 2017).

Dengan pernyataan demikian, Błaszczak menggunakan logika *post facto* (Polandia tidak menerima, maka aman), yang memposisikan pencari suaka adalah ancaman teror nyata bagi Polandia.

Aktor non-pemerintah dan oposisi juga memiliki keterlibatan dengan memainkan perannya sendiri. Dalam sisi lain organisasi masyarakat sipil dan aktivis HAM berusaha juga menyadarkan masyarakat Polandia terkait sudut pandang kemanusiaan terhadap para imigran. Berbagai organisasi terlibat, beberapa diantaranya adalah *Polish Humanitarian Action (PAH)* dan *Open Dialogue Foundation (ODF)* yang kerap kali menyuarakan melalui beragam kampanye serta mereka aktif dalam mengadvokasikan kebijakan yang mendukung hak-hak pencari suaka. Salah satu kampanye besar bernama *“Refugees Welcome”*, dihadirkan dengan berbagai hiburan salah satunya disertakannya konser, pesan utama kampanye ini adalah menentang sikap anti-pengungsi di media nasional (Williamson 2015). Namun demikian, terlepas dari upaya berbagai pihak yang berusaha menyadarkan masyarakat Polandia, berdasarkan survey independent menunjukkan mayoritas warga Polandia tetap skeptis terhadap migran, sekitar 74%

menolak kedatangan pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah atau Afrika, dari pendukung-pendukung partai PiS bahkan sebesar 90% menolak (Ciobanu 2017).

2.2 Krisis Pencari Suaka Timur Tengah di Polandia (2015-2018)

2.2.1 Ketegangan Sosial dan Polarisasi Masyarakat

Periode 2015-2018 di Polandia ditandai dengan peningkatan ketegangan sosial seiring krisis pencari suaka Timur Tengah dan berbagai retorika yang diperkuat oleh pemerintahan PiS. Sejak akhir tahun 2015, narasi politik Polandia menggambarkan kedatangan pencari suaka Muslim sebagai ancaman serius. Misalnya, pada saat pemilu terjadi saja PiS menekankan bahwa kedatangan pencari suaka Muslim dapat mengancam budaya, kesehatan, dan keamanan negara. Bahkan pemimpin partai tersebut menyatakan bahwa *“Do you really want the same thing to happen in Poland: that we stop feeling at home in our own country?”* pernyataan yang dikaitkan dengan berbagai peristiwa teror yang terjadi di Eropa kala itu (Hargrave dan Jarosz 2023). Pernyataan seperti demikian menciptakan suasana ketakutan bahwa pencari suaka dari Timur Tengah akan membawa bahaya terorisme dan penyakit, bersama dengan narasi itu, pemerintah kemudian menuangkannya dalam kebijakan keamanan ketat.

Meskipun hanya sedikit pencari suaka Muslim yang datang dari Timur Tengah yang mencapai hingga perbatasan Polandia pada tahun 2015, migrasi yang terjadi di tempat lain di Eropa telah sangat dipolitisasi, terutama oleh PiS, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN), dan kelompok-kelompok sayap kanan yang menjadi bagian dari Kukiz'15. Para kandidat politik secara terbuka mengungkapkan pandangan xenofobia, rasis, dan islamofobia,

membuat poster-poster anti-pengungsi, dan berpartisipasi dalam demonstrasi yang menentang islamisasi Polandia dan Eropa (Gozdziak 2018). Berbeda dengan penerimaan pencari suaka asal Timur Tengah yang beragama Kristen, sebanyak 150 pencari suaka diterima. Penerimaan tersebut didasari karena mereka dianggap lebih serumpun dengan masyarakat Polandia (Associated Press 2015).

Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) dan *Młodzież Wszechpolska* (MW) merupakan organisasi ultranasionalis sayap kanan di Polandia. Kedua organisasi yang memiliki kesamaan ideologi ini telah berdiri selama puluhan tahun. ONR merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 1993, organisasi yang terlahir kembali sejak kelahiran pertamanya pada tahun 1930-an (Vanessa Gera 2017). Sementara itu MW yang berhaluan *Catholic-nationalist* dengan tujuan untuk mencetak pemuda Polandia dengan semangat Katolik dan Patriotik didirikan pada tahun 1989 (Onet.pl 2016). Sebagai organisasi sayap kanan ekstrim, ONR maupun MW kerap berkolaborasi dengan gerakan partai politik nasionalis yang lebih luas. Kedua organisasi ini memposisikan diri sebagai pembela identitas nasional Polandia, dengan memandang arus pencari suaka dari Timur Tengah sebagai ancaman langsung terhadap identitas mereka (Vanessa Gera 2017). Dengan sikap yang sejalan dengan narasi pemerintah Polandia di bawah PiS yang menolak relokasi pencari suaka dari Timur Tengah, sehingga ONR dan MW menjadi kekuatan sosial yang memperkuat sentimen anti-pengungsi di akar rumput (Vanessa Gera 2017).

Pada akhir tahun 2015 bentuk tidak terimanya masyarakat terhadap imigran dituangkan lewat aksi anti-pengungsi yang digalang oleh ONR dan MW. Contohnya adalah aksi demonstrasi besar di Wrocław pada 11 November 2015, aksi

ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dengan berbagai slogan anti-islam yang ditujukan pada imigran asal Timur Tengah (Gozdziak 2018). Respon masyarakat terhadap isu pencari suaka terlihat sangat jelas, survey menunjukkan mayoritas warga Polandia menolak imigran Muslim, sebanyak dua pertiga warga atau sebanyak 25,510,874 penduduk menentang kedatangan imigran asal Timur Tengah dan Afrika (Natalia Ojewska 2015a).

Aksi serupa berlangsung setiap tahunnya, hingga pada puncak terbesarnya pada tahun 2017 dengan setidaknya dihadiri oleh lebih dari 60.000 orang, aksi yang diselenggarakan selalu bertepatan dengan hari kemerdekaan Polandia pada tanggal 11 November bertajuk sama dengan kemerdekaan Polandia (Aljazeera 2017). Aksi ini memiliki makna tersirat dengan mengembalikan kemerdekaan Polandia, dengan memposisikan para imigran adalah perenggut kemerdekaan Polandia, dalam aksi yang digalang oleh ONR dan MW, narasi paling umum dalam gerakan aksi ini adalah *“Pure Poland, white Poland!”* (Matthew Taylor 2017). Dalam berbagai narasi yang dituangkan dalam spanduk, beberapa diantaranya bahkan menggambarkan kuda troya dengan gambar karikatur stereotip umat Muslim mengenakan rompi bom di dalamnya, dengan arti bahwa imigran Muslim adalah musuh dalam selimut yang siap merebut Eropa (Mandhai 2017).

2.2.2 *Peran Media Domestik*

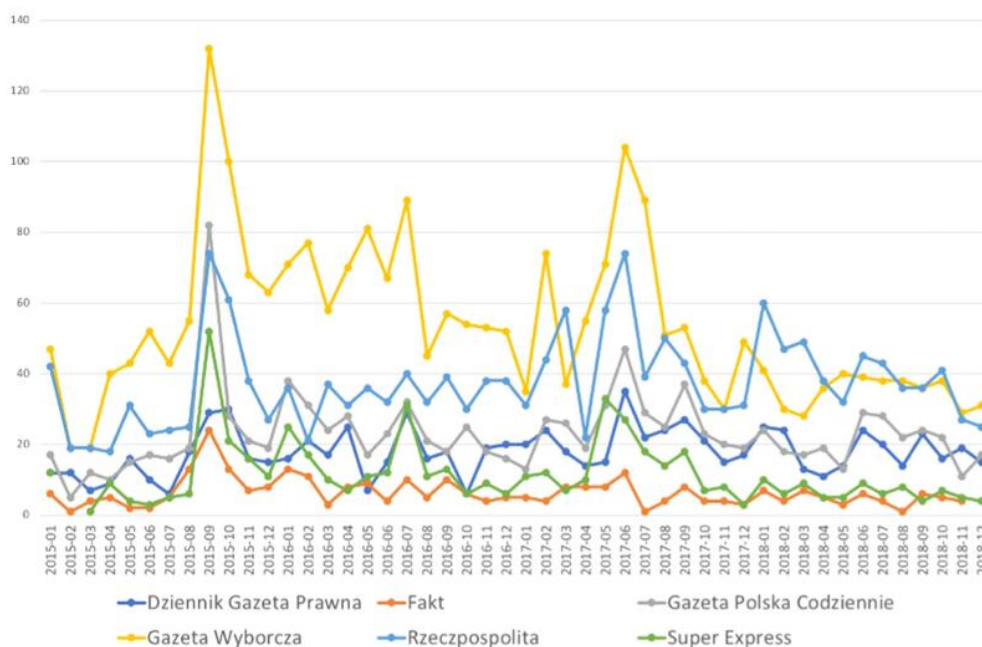
Media domestik Polandia dalam hal ini terlihat seperti terpecah dalam meliputi isu imigran, tidak keseluruhan media berat kepada satu sisi, namun dalam kenyataannya golongan media terbagi dua, media konservatif merupakan media-media yang terus mengangkat aspek negatif dan ancaman terhadap para imigran, di sisi lain media liberal adalah media yang menyerukan terkait kesadaran atas

solidaritas yang dibutuhkan untuk para imigran (Troszyński dan El-Ghamari 2022). Secara terang-terangan media memberitakan masing-masing pandangannya terhadap para imigran, bahkan analisis Korpus Media menemukan bahwa media *Gazeta Polska Codziennie* dan *Fakt* yang merupakan media cetak konservatif sayap kanan yang kerap mendukung PiS memberikan narasi yang menyulut rasa benci kepada para imigran, berbanding terbalik dengan media cetak *Gazeta Wyborcza* dan *Rzeczpospolita* yang mendukung sekali Uni Eropa dan isu pencari suaka. (Troszyński dan El-Ghamari 2022). Hal sama juga terjadi di ranah media tabloid, penerbit majalah mingguan *wSiecie* konsisten dalam menampilkan krisis migran sebagai ancaman bagi Polandia, sedangkan penerbit majalah mingguan *Polityka* memandang pencari suaka ini adalah tantangan yang menuntut solidaritas dan partisipasi aktif Polandia dalam politik Eropa (Fordoński dan Lewandowski 2019).

Surat kabar *Gazeta Polska Codziennie* (GPC) rutin mengangkat berita terkait demonstrasi anti-pengungsi dan media ini lebih merapat kepada pihak yang menolak pembagian kuota pencari suaka yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Dalam setiap narasi berita mereka, surat kabar ini selalu menambahkan detail yang didramatisir terkait para imigran Timur Tengah, mereka mengangkat bagaimana perilaku para imigran Timur Tengah di perbatasan Balkan atau aksi protes anti-imigran di negara-negara Eropa Barat, mereka mengulasnya sebagai peringatan akan bahaya yang mengintai Polandia (Troszyński dan El-Ghamari 2022). GPC juga kerap sekali mengkritisi para pejabat Uni Eropa dengan menyebut mereka sebagai “birokrat gila” karena telah memaksa Polandia menerima imigran, dengan demikian mereka memposisikan Polandia sebagai korban dari tekanan kekuatan asing (Troszyński dan El-Ghamari 2022).

Tabloid *wSiecie* menggambarkan bagaimana para imigran adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap Polandia. Pada edisi cetak mereka yang terbit pada februari 2016, menunjukkan sampul yang sangat kontroversial pada kala itu. Dalam sampul majalah tersebut menggambarkan sesosok wanita kulit putih yang menggunakan bendera Uni Eropa sebagai pakaiannya sedang dalam serangan oleh tangan-tangan berkulit gelap. Dengan gambar kontroversial itu, *wSiecie* memberikan judul edisi tersebut dengan “*Islamic Rape of Europe*” (Jack Sommers 2016). Dalam majalah tersebut terdapat berbagai narasi negatif baik mengarah atas keputusan Uni Eropa yang menerima imigran asal Timur Tengah maupun gambaran negatif kepada imigran asal Timur Tengah itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah “*What the media and Brussels elite are hiding from the citizens of the European Union*” (Jack Sommers 2016).

Grafik 3 Jumlah Artikel Terkait Migran di Media Polandia pada Tahun 2015-2018



Sumber: (Troszyński dan El-Ghamari 2022)

Berdasarkan grafik 3, dominasi pemberitaan memang terjadi perbedaan yang cukup signifikan, dalam studi Troszyński dan El-Ghamari mencatat sebanyak 18.563 artikel berita terkait migrasi dari tahun 2015-2018, dengan surat kabar liberal *Gazeta Wyborcza* (GW) menjadi yang paling banyak jumlah pemberitaannya dibanding media lainnya. Sebaliknya, surat kabar *Gazeta Polska Codziennie* (GPC) berada di bawahnya secara jumlah, namun ini adalah jumlah lonjakan yang tidak biasa oleh media tersebut, meskipun dalam beberapa waktu kedepan jumlahnya tidak konsisten seperti pada masa awal krisis (Troszyński dan El-Ghamari 2022). Pola serupa seperti masa awal krisis terjadi kembali pada pertengahan 2017 ketika memuncaknya sengketa antara Polandia dan Komisi Eropa soal relokasi imigran, sekitar 447 artikel terkait migran terbit, di mana GPC kembali meningkatkan volumenya meskipun tidak setinggi pada masa awal krisis. Sementara itu, media tabloid justru memuat lebih sedikit berita soal imigran dibanding surat kabar, namun mereka mengimbangi dengan dengan pemakaian konotasi lebih negatif (Troszyński dan El-Ghamari 2022).

Konstelasi pemberitaan media yang terbelah dua di atas berdampak nyata terhadap opini publik Polandia. Perubahan yang drastis dari sikap masyarakat terhadap para pencari suaka Timur Tengah antara 2015-2016 beriringan dengan pergeseran yang dihasilkan oleh media. Pada awal 2015, sentimen publik Polandia termasuk paling positif di Eropa terhadap para imigran, survei Mei 2015 menunjukkan sekitar 72% warga setuju dan memiliki pandangan relatif positif terhadap para imigran. Namun, setelah setahun adanya iklim negatif yang diciptakan oleh media yang anti-imigran, persepsi dan dukungan positif oleh publik Polandia menurun secara drastis, pada April 2016 berdasarkan survei yang

dilakukan menunjukkan dari 72% menurun hingga 33%. Dalam survei tersebut jika pertanyaan spesifik terkait pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah awalnya pada Mei 2015 hanya 53% masyarakat Polandia menolak kehadiran mereka, dan memuncak di waktu yang sama yaitu pada April 2016 menjadi 71% (Annika Morath 2017).

Penurunan terhadap para imigran secara garis besar dan kenaikan penolakan yang secara spesifik terhadap imigran Timur Tengah menurut para pengamat mengaitkannya dengan masifnya kampanye anti-imigran oleh media yang digerakkan oleh pemerintah dan para pendukungnya. Media konservatif nasionalis berhasil membingkai isu imigran sebagai krisis keamanan nasional yang mengancam Polandia, sehingga rasa takut dan curiga menguasai benak publik (Annika Morath 2017). Peran negara secara langsung yang mempengaruhi narasi anti-pengungsi adalah ketika Pemerintahan PiS pada tahun 2016 menasionalisasi stasiun-stasiun TV pada tahun 2016 dengan undang-undang kontroversial, lalu menjadikannya sebagai corong propaganda resmi (BBC 2016).

2.2.3 Kebijakan Negara dan Respon Keamanan

Polandia di bawah pemerintahan PiS menempuh serangkaian kebijakan internal yang keras terkait migrasi dan keamanan nasionalnya pada tahun 2015-2018. Sebagai salah satu negara Visegrád, Polandia menolak program relokasi pencari suaka Uni Eropa. Menurut Menteri Dalam Negeri Mariusz Błaszczak pemerintahan Polandia terdahulu telah menempatkan “bom waktu” di Polandia dengan menyetujui program relokasi pencari suaka dan menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintahan PiS merupakan “penjinakkan bom” demi melindungi Polandia (Jan Cienski 2017). Setelah serangan teroris di Brussel pada

Maret 2016, perdana Menteri Beata Szydło semakin menegaskan bahwa Polandia tidak akan menerima imigran, dengan menyatakan “tidak ada kemungkinan” (Cienski 2016).

Dalam penerapannya, Polandia melakukan pengetatan perbatasan dan pembatasan akses suaka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas Polandia memperkuat penjagaan di perbatasan timur dan sangat ketat dalam melakukan pemeriksaan. Tercatat pada tahun 2016 Polandia menolak masuk sebanyak 34.845 warga non-Uni Eropa di perbatasannya, angka tersebut merupakan tertinggi ketiga di antara negara anggota Uni Eropa tahun itu (Global Detention Project 2018). Prosedur penerimaan suaka diperlambat dan syaratnya diperketat, lebih dari 80% pemohon suaka ditolak di tahap awal, dan kurang lebih 98% ditolak di tingkat banding, dari 5.053 pencari suaka yang terdaftar sepanjang 2017, hanya 150 yang diberikan izin untuk masuk Polandia. Pemerintah Polandia secara tegas menutup akses bagi pencari suaka dari Timur Tengah, Asia Selatan, maupun Afrika atas dalih keamanan. Di pos perbatasan Terespol yang berbatasan dengan Belarusia, pihak keamanan dilaporkan secara sistematis menolak dan mengembalikan secara sepihak para pencari suaka untuk kembali ke Belarusia (Global Detention Project 2018).

Meskipun Pemerintah Polandia menolak hingga menutup perbatasannya untuk pencari suaka asal Timur Tengah, namun nyatanya terdapat penerimaan kepada 150 pengungsi yang berasal dari Suriah pada tahun 2015 (Associated Press 2015). Para pengungsi yang diterima tersebut adalah umat Kristen Suriah, yang oleh Pemerintah Polandia dianggap lebih “serumpun” secara religi dengan mayoritas masyarakat Polandia yang beragama Katolik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan sebenarnya bukan berasal dari mana mereka berasal, namun dipengaruhi oleh identitas keagamaan mereka. Kelompok ini diterima melalui kerja sama dengan organisasi Kristen Polandia bernama *Estera Foundation*, kerja sama ini di luar skema relokasi Uni Eropa (Euronews 2015). Dengan adanya kasus demikian, memperkuat penolakan terhadap pencari suaka Timur Tengah lebih diarahkan kepada mereka yang Muslim.

Selain menolak kuota, pemerintah Polandia memberlakukan kebijakan darurat baru di tingkat nasional. Sorotan utamanya adalah UU Anti-Terrorisme 2016. Undang-undang ini memperluas kewenangan aparat keamanan untuk mengusir dengan segera setiap warga negara asing yang dicurigai terlibat terorisme atau spionase. *Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego* (ABW) diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memantau warga asing bahkan termasuk warga yang berasal dari Uni Eropa juga, andaikan ada sesuatu yang mencurigakan. Di dalam UU tersebut mengizinkan penyadapan terhadap telepon warga asing tanpa perintah pengadilan, pengumpulan sidik jari, foto biometrik, serta data DNA orang asing jika identitasnya dianggap meragukan (EDRi 2016). Dalam praktiknya komunitas Muslim yang kerap menjadi target kecurigaannya meskipun hingga saat itu belum ada kejadian nyata terkait tindakan teror yang disebabkan oleh kelompok Muslim. Berdasarkan kecurigaan semata, banyak proses deportasi yang dilakukan tanpa ada bukti yang konkrit, dan para terdakwa diinterogasi tanpa akses informasi terkait kasusnya (Pikulicka-Wilczewska 2020). Pasukan perbatasan Polandia secara *de facto* juga mengambil alih tugas yang sebelumnya dijalankan oleh *Office of Foreigners* dengan menjalankan seleksi awal bagi para imigran.

BAB 3

SEKURITISASI POLANDIA TERHADAP PENCARI SUAKA

TIMUR TENGAH

Bab ini adalah analisis utama dari penelitian, yaitu bagaimana pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dari tahun 2015-2018. Analisis dalam bab ini mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, yang dijadikan landasan teoritis penelitian ini. Upaya sekuritisasi akan dibedah melalui tujuh komponen utama yang menjadi indikator terjadinya sekuritisasi. Dimulai dari *securitizing actors* dan *functional actors*, selanjutnya identifikasi *referent objects* yang perlu dilindungi. Dalam bab ini membahas *speech act* yang digunakan untuk melegitimasi tindakan sekuritisasi. Selanjutnya bagaimana narasi terhadap imigran dibentuk sebagai *existential threat*, dan bagaimana penanganan ancaman tersebut diatasi dengan *emergency measures* yang juga merupakan bentuk dari *breaking free of rules* yang dilakukan untuk membenarkan kebijakan tersebut.

3.1 *Securitizing Actors dan Functional Actors*

3.1.1 Securitizing Actors

Perdana Menteri Beata Szydło, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki serta Menteri-menteri seperti Mariusz Błaszczak (Menteri Dalam Negeri) dan Witold Waszczykowski (Menteri Luar Negeri) menggambarkan perlunya melindungi kedaulatan Polandia dari ancaman eksternal. Mereka menyampaikan gagasan terkait keamanan nasional melalui pidato dan wawancara resmi. Melalui posisi-

posisi berwenang, mereka menyampaikan *speech act* yang menegaskan keteguhan mereka berasal atas melindungi Polandia dan tidak ingin hak negara mereka ditaruhkan atas perintah Brussel (Reuters 2015b). Peristiwa krisis pencari suaka yang terjadi bertepatan ketika masa pemilu di Polandia yang terjadi pada tahun 2015. Hal ini membuat tokoh-tokoh PiS mempolitisasi isu pencari suaka tersebut. PiS mengandalkan kedekatannya dengan Hungaria bersepakat untuk bersama menolak kebijakan membagi rata jumlah pencari suaka oleh Uni Eropa. Dalam kampanye 2015 Kaczyński menyatakan bahwa pencari suaka Timur Tengah telah membawa penyakit mematikan dan segala macam parasit dan protozoa yang bagi imigran sudah biasa namun menjadi masalah serius bagi Polandia (Jan Cienski 2015).

Perdana Menteri Beata Szydło dan penerusnya Mateusz Morawiecki melanjutkan pola narasi serupa dengan bahasa dan gaya mereka sendiri. Szydło sebagai pimpinan eksekutif PiS menolak kewajiban kuota Uni Eropa dengan argumen keamanan nasional. Szydło menegaskan bahwa dukungan kepada migran akan lebih mudah dan lebih baik ketika Polandia harus memberikan bantuan kemanusiaan di negara asal pencari suaka itu sendiri dibandingkan harus menampung mereka (Annabele Chapman 2016). Ucapan ini secara implisit membingkai penerimaan pencari suaka sebagai keputusan politik yang mahal dan tidak menghasilkan keamanan, sehingga lebih baik membantu lebih jauh. Sementara itu, Morawiecki saat masa awal jabatannya tahun 2018 menyatakan secara tegas bahwa pemerintahannya tidak akan menerima pencari suaka asal Timur Tengah dan Afrika Utara di Polandia, meskipun Uni Eropa keberatan dengan hal itu (Euronews 2018). Dengan begitu, Morawiecki menegaskan bahwa Polandia

akan melawan upaya paksa Uni Eropa, merujuk pada rencana PiS tahun 2015 untuk melindungi kedaulatan nasional Polandia. Kesamaan retorika Szydło dan Morawiecki menunjukkan bahwa formasi pemerintahan PiS memperlakukan isu imigran sebagai ancaman keberlanjutan.

Secara keseluruhan, aktor-aktor utama dengan posisi kekuasaan tinggi dan wacana retoris yang agresif berhasil mengkonstruksi pencari suaka Timur Tengah sebagai ancaman nasional. Bentuk *speech act* mereka dalam pidato kampanye, pernyataan pers, dan wawancara penuh dengan istilah dehumanisasi ditambah dengan budaya historis yang negatif. Langkah ini berhasil mempengaruhi masyarakat Polandia, melegitimasi kebijakan keras seolah tugas melindungi negara.

3.1.2 *Functional Actors*

Organisasi masyarakat seperti *Obóz Narodowo-Radykalny* (ONR) dan *Młodzież Wszechpolska* (MW) memiliki peran aktif memperkuat narasi ancaman yang diusung oleh *securitizing actor*. Organisasi ini membingkai bahwa pencari suaka asal Timur Tengah merupakan ancaman mematikan bagi Polandia yang dapat merusak nilai-nilai Polandia. ONR dan MW yang merupakan kelompok ultranasionalis mengisi ruang publik dengan berbagai macam gerakan anti-pengungsi serta menyebarkan narasi-narasi yang mendukung penolakan terhadap pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah. Dengan berbagai macam slogan dan simbol-simbol yang menunjukkan supremasi kulit putih seperti “*Pure Poland, White Poland*” (Matthew Taylor 2017). Secara masif mereka menggambarkan pencari suaka sebagai musuh bangsa, mereka memanfaatkan berbagai macam cara

untuk menyampaikan pesan-pesan anti-pengungsi, mereka melancarkan aksinya melalui media sosial, forum daring dan membuat situs web (Annika Morath 2017).

Tidak hanya organisasi masyarakat saja namun media turut memperkuat narasi ancaman yang dibangun oleh elit PiS dengan menyebarluaskan pesan-pesan ketakutan ke khalayak luas. Laporan Al Jazeera pada akhir 2015 mencatat bahwa sentimen anti-pengungsi yang didorong oleh retorika politik memang menjadi arus utama dalam diskursus publik dan pemberitaan pers Polandia (Natalia Ojewska 2015b). Media berfungsi sebagai penghubung antara *securitizing actors* dan audiens, di mana mereka membantu menciptakan *sense of urgency* dengan menyoroti imigrasi sebagai krisis keamanan yang mendesak (Buzan, Waever, dan Wilde 1998). Dengan kata lain, tanpa dukungan media yang terus-menerus menggaungkan isu ancaman pencari suaka, upaya sekuritisasi pemerintah akan sulit mencapai penerimaan luas di tengah masyarakat.

Media konservatif di Polandia secara konsisten menonjolkan sisi negatif dari pencari suaka Timur tengah, sehingga membentuk persepsi bahwa pencari suaka identik dengan bahaya. Dalam tulisan Troszyński dan El-Ghamari (2022) menemukan adanya jurang perbedaan pola pemberitaan: media pro-pemerintah hanya menayangkan aspek-aspek problematik dari migrasi, dan bila tidak ada isu migran yang dapat diangkat di Polandia, mereka mengalihkan fokus pada kekacauan pencari suaka di negara Eropa lain sebagai bahan pemberitaan (Troszyński dan El-Ghamari 2022). Langkah ini membuat ancaman terkesan nyata dan dekat, walaupun Polandia sebenarnya menerima sangat sedikit pencari suaka asal Timur Tengah. Pada puncak isu krisis imigran tahun 2015, harian kanan *Gazeta Polska Codziennie* (GPC) meningkatkan jumlah artikelnya secara drastis terkait

pencari suaka, dari 20 hingga 82 artikel perbulan yang berisi narasi negatif (Troszyński dan El-Ghamari 2022). Sementara itu, media liberal seperti *Gazeta Wyborcza* (GW) menyoroti perspektif yang berbeda dengan menggambarkan pandangan solidaritas dan simpati terhadap para pencari suaka, namun suara mereka tenggelam oleh gelombang retorika ketakutan di media konservatif. Akibat pemberitaan yang berat sebelah, publik Polandia semakin terpolarisasi dan banyak yang terpengaruh untuk melihat imigran Timur Tengah bukan lagi sebagai individu pencari suaka, melainkan sebagai ancaman kolektif bagi keamanan nasional dan identitas budaya Polandia (Troszyński dan El-Ghamari 2022).

Media berhaluan kanan juga kerap menggunakan retorika hiperbola dan simbolisme ekstrem untuk menggambarkan pencari suaka asal Timur Tengah sebagai ancaman yang nyata. Salah satu contoh paling mencolok adalah sampul majalah konservatif *wSieci* edisi Februari 2016 yang menggambarkan seorang wanita kulit putih Eropa dibalut bendera Uni Eropa tengah diserang oleh tangan-tangan berkulit gelap, disertai dengan judul yang provokatif “*Islamic Rape of Europe*” (Jack Sommers 2016). Representasi visual dan verbal yang vulgar ini menuai kecaman internasional, namun di dalam negeri justru semakin memperkuat gambaran bahwa para imigran identik dengan kekerasan dan kehancuran kehidupan sosial di Eropa (Jack Sommers 2016).

Pada akhirnya, peran organisasi masyarakat dan media sebagai *functional actors* melicinkan jalan bagi pemerintah dalam menerapkan *emergency measure* dengan *breaking free of rules*. Dengan memastikan bahwa *speech act* para elit PiS memperoleh resonansi kuat, mereka membuat gambaran pencari suaka adalah ancaman menjadi hal yang nyata, sehingga publik mengorbankan nilai-nilai

kemanusiaan atau kewajiban internasional. Dengan peran *functional actors* ini memberikan dukungan pemerintah Polandia untuk mengambil keputusan yang dianggap menyelamatkan negara.

3.2 Referent Objects dalam Narasi Keamanan Polandia

Pada sub-bab ini, analisis difokuskan pada *referent objects* yakni objek-objek yang secara eksplisit dikonstruksikan oleh elit politik Polandia sebagai sesuatu yang “harus dilindungi” dalam narasi keamanan mereka. Dalam konteks narasi keamanan Polandia 2015-2018, beberapa objek perlindungan yang dikedepankan oleh elit politik antara lain keamanan nasional dan keselamatan warga, identitas budaya dan agama bangsa, serta stabilitas sosial-ekonomi negara. Objek-objek inilah yang “korban” potensial oleh hadirnya pencari suaka Muslim asal Timur Tengah, sehingga pemerintah merasa berhak mengambil keputusan. Analisis berikut akan menguraikan bagaimana masing-masing objek tersebut dibingkai sebagai suatu yang terancam, dan bagaimana konstruksi ini berperan dalam melegitimasi kebijakan Polandia terhadap para imigran Timur Tengah.

Pengalaman historis Polandia yang terbatas dalam keberagaman sejak dahulu membentuk pola sosial dan politik yang tertutup terhadap kelompok luar yang berbeda secara agama, bahasa, dan budaya. Bahkan hingga tahun 2015, proporsi warga asing di Polandia bahkan hanya sekitar 0,1% dari total populasi, menjadikan yang terendah di antara negara-negara Uni Eropa (Natalia Ojewska 2015a). Dalam kecenderungan tersebut, identitas nasional Polandia pada Katolik yang merupakan agama mayoritas penduduknya menjadikan keberadaan pencari suaka asal Timur Tengah sebagai ancaman terhadap homogenitas kultural dan nilai-nilai Polandia.

Keamanan nasional menjadi *referent object* utama yang diklaim terancam oleh arus masuk imigran Timur Tengah. Elit politik Polandia terutama dari kubu pemerintahan konservatif (PiS) secara aktif membingkai pencari suaka Muslim sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan dan keamanan publik. Para pencari suaka asal Timur Tengah kerap dicurigai terkait terorisme atau kriminal, seolah-olah kedatangan mereka otomatis meningkatkan risiko serangan teroris dan kejahatan di Polandia. Tokoh PiS, menggambarkan pencari suaka asal Timur Tengah sebagai orang asing yang berbahaya dengan niat jahat, yang dapat mengancam fisik warga Polandia melalui aksi teror dan tindak kriminal (Polko 2025). Bahkan, retorika pemerintah pada masa krisis imigran tahun 2015 menyamakan para pencari suaka Muslim dengan kelompok teroris yang harus dilawan dan disingkirkan demi menjaga keselamatan negara. Narasi semacam ini menempatkan keamanan rakyat dan kedaulatan negara sebagai sesuatu yang berada di ujung tanduk akibat kehadiran imigran, sehingga memupuk rasa takut di tengah masyarakat tanpa tindakan tegas, stabilitas dan keamanan nasional Polandia akan runtuh.

Pemerintah Polandia berulang kali menegaskan bahwa gelombang datangnya pencari suaka asal Timur Tengah akan membawa kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat Polandia, baik dalam bentuk gejolak sosial maupun ancaman terhadap keamanan, tetapi juga akan merusak tatanan sosial masyarakat (Jan Cienski 2017). Kaczyński, secara berulang mengatakan bahwa mereka adalah infiltran yang akan menginfiltrasi keamanan Polandia, dan akan merusak tatanan sosial masyarakat Polandia (Jan Cienski 2017). Selain itu, aspek ekonomi menjadi aspek yang dikemukakan, elit politik menggaungkan bahwa para imigran ini akan

menjadi beban negara dengan menggerogoti fasilitas sosial dan akan mengambil kesempatan lapangan kerja yang seharusnya milik warga Polandia itu sendiri (Polko 2025). Hal ini karena para pencari suaka muslim dilabeli sebagai pemalas yang sebenarnya memilih Polandia karena hanya ingin hidup dari sistem *welfare* yang terdapat di Polandia, sehingga kehadiran mereka dikhawatirkan mengancam ekonomi Polandia maupun sistem kesejahteraan negara.

Identitas budaya nasional dan agama mayoritas (katolik) juga dijadikan *referent object* yang diklaim terancam oleh imigran asal Timur Tengah. Polandia memandang dirinya sebagai negara homogen yang menjunjung warisan budaya dan tradisi katolik yang kuat, dan citra ini dimanfaatkan elit politik untuk membingkai pencari suaka Muslim sebagai “*Others*” yang asing dan tidak cocok dengan masyarakat Polandia (Narkowicz 2018). Para tokoh PiS secara eksplisit mengekspresikan kekhawatiran bahwa arus pencari suaka Muslim akan mengikis identitas Katolik Polandia serta menghancurkan budaya Polandia dari dalam. Dalam retorika PiS, misalnya, pencari suaka Muslim digambarkan mustahil berintegrasi karena perbedaan agama dan budaya mereka. Keberadaan mereka dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan nilai-nilai kebangsaan Polandia yang erat dengan Katolik (Polko 2025). Muslim dianggap sebagai musuh kultural yang membawa nilai-nilai berlawanan dengan tradisi Polandia. Pencari suaka Muslim asal Timur Tengah digambarkan sebagai manusia dengan “niat buruk” yang akan memaksakan kehendak syariat kepada masyarakat Polandia. Muslim digambarkan akan menodai tempat-tempat suci Katolik dengan mempergunakannya sebagai toilet (Jan Cienski 2015).

Dengan kata lain, pencari suaka asal Timur Tengah tidak hanya dikonstruksikan sebagai ancaman fisik, namun sebagai ancaman identitas juga yang dapat merusak tatanan sosial-budaya bangsa. Melalui pembingkai ini, elit Polandia menempatkan budaya dan agama nasional pada posisi terancam, sehingga publik diyakinkan bahwa upaya menolak pencari suaka adalah upaya menyelamatkan jati diri bangsa. Dengan mengklaim bahwa keamanan nasional, identitas kultural-religi, serta stabilitas sosial-ekonomi Polandia berada di bawah bayang-bayang *existential threat*, elit politik berhasil menciptakan *sense of urgency* yang membenarkan langkah-langkah di luar batas politik biasanya. Konstruksi *referent objects* telah dijadikan justifikasi normatif untuk setiap tindakan penolakan. Mulai dari veto kebijakan Uni Eropa hingga retorika konfrontatif pemerintah. Dengan adanya *referent objects* menjadikan pembenaran yang kuat di mata publik.

3.3 *Speech Act*: Retorika Ancaman oleh Elit Politik Polandia

Setelah kemenangan dalam pemilu tahun 2015 pemerintahan dalam kekuasaan PiS yang dipimpin oleh Presiden Andrzej Duda dan Perdana Menteri Beata Szydło memposisikan tegas menolak kebijakan Uni Eropa soal relokasi pencari suaka. Dengan wacana publik yang membingkai pencari suaka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Polandia dan Eropa memberi legitimasi mereka dalam mengambil kebijakan tersebut.

Perdana Menteri Polandia Beata Szydło menyalahkan Uni Eropa dengan mempertanyakan mengapa kesalahan negara lain dalam mengurus pencari suaka harus ditanggung oleh negara lain, narasinya pada akhir 2015 menyatakan “*One cannot call attempts to export problems, which some countries have created without*

others". Usai serangan bom di Brussels pada Maret 2016, Szydło semakin menegaskan *"I say very clearly that I see no possibility at this time of immigrants coming to Poland"* yang kembali ditekankan oleh juru bicara pemerintah bahwa *"We cannot allow a situation to develop whereby the events that are now happening in Western Europe spread to Poland"* (Cienski 2016). Tidak hanya itu, ketua partai PiS juga menyatakan *"Do you really want the same thing to happen in Poland: that we stop feeling at home in our own country"* pernyataan demikian semakin menekankan bahaya terorisme yang dibawa ketika menerima para pencari suaka (Hargrave dan Jarosz 2023).

Pada pertengahan 2017, Szydło bahkan menimbulkan kontroversi internasional ketika dalam pidatonya dalam peringatan kamp *Auschwitz* ia menyatakan bahwa *"Auschwitz is a lesson showing that everything needs to be done to protect one's citizens"*. Pernyataannya itu ditafsirkan sangat luas sebagai pembenaran secara terselubung atas kebijakan anti-pencari suaka pemerintah, seolah-olah menerima pencari suaka dianggap sebagai sesuatu ancaman luar biasa bagi eksistensial sebuah bangsa (Lydia Kelly 2017). Insiden Auschwitz ini menunjukkan sejauh mana retorika ancaman telah meresapi politik Polandia, isu keamanan yang semula bernuansa kemanusiaan sepenuhnya diubah menjadi isu keamanan demi meraih legitimasi politik (Lydia Kelly 2017).

Menteri luar negeri Polandia Witold Waszczykowski, menggunakan metafora sejarah untuk mengecam kebijakan relokasi Uni Eropa. Waszczykowski menegaskan bahwa merelokasi pencari suaka tanpa persetujuan merupakan tindakan yang tidak bermoral sebagaimana yang disampaikannya *"We don't want Poland to become one big camp for people to spend their lives protected and*

guarded behind fences. Migration into a country should be voluntary.” (Ivan martin 2017).

Narasi ini berlanjut di bawah Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, yang menggantikan Szydło pada akhir 2017 dengan mengusung retorika ancaman serupa. Pada awal 2018, Morawiecki menegaskan bahwa janjinya untuk warga Polandia ketika partainya berkampanye pada tahun 2015 “... *that we will not be receiving migrants from the Middle East and Northern Africa in Poland*” (Euronews 2018). Menteri Dalam Negeri Polandia, Mariusz Błaszczak kembali menekankan terkait janji pemilu dan membenarkan langkah pemerintah bahwa “*There were no terror attacks in Poland because Poland has backed out of a decision that was taken by previous government to accept thousands of migrants called refugees.*” Dengan pernyataan demikian, Błaszczak meyakini bahwa selama ini Polandia tidak mengalami tindakan terorisme karena menolak para pencari suaka.

Retorika ancaman Kaczyński, Duda, Szydło dan Morawiecki tersebut menjadi pondasi bagi proses sekuritisasi, karena dengan terciptanya ketakutan publik dan dukungan politik, pemerintah Polandia memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah-langkah di luar hukum terhadap para pencari suaka (Broomfield 2016). Jarosław Kaczyński yang secara de facto memegang peranan utama dalam narasi anti-pencari suaka, beliau melakukan ini dengan kapasitasnya sebagai ketua partai PiS dan mantan Perdana Menteri. Di masa kepemimpinannya, PiS sejak awal secara vokal menentang rencana Uni Eropa dalam menampung pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah dan menjadikan isu tersebut menjadi agenda utama mereka (Broomfield 2016).

3.4 Existential Threat, Breaking Free of Rules dan Emergency Measure

3.4.1 Existential Threat

Existential Threat dalam kasus Sekuritisasi yang terjadi di Polandia menjurus kepada para pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah. pencari suaka digambarkan sebagai sesuatu yang dapat mengancam bagi keberlangsungan bangsa dan negara. *Existential Threat* yang paling dikedepankan dalam kasus ini mencakup terorisme dan disintegrasi buaya, disamping aspek ekonomi. Kedua elemen terorisme dan potensi degradasi akan norma sosial dan budaya Polandia menjadi fokus utama narasi ancaman oleh *securitizing actors*. Imigran digambarkan bukan sekadar isu sosial, melainkan sebagai bahaya laten yang dapat menggoyahkan keamanan nasional dan kohesi sosial budaya negara Polandia.

Narasi ancaman terorisme sangat dominan dalam konstruksi imigran sebagai *existential threat*. *Securitizing actors* kerap mengaitkan para pencari suaka khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika dengan risiko meningkatnya terorisme dan radikalisme. Partai PiS secara tegas menolak menerima pencari suaka Muslim dari Timur Tengah dan Afrika karena dianggap memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris atau ideologi radikal (Wintour 2017). Narasi yang menguat pasca terjadinya serangan teror yang tersebar di Eropa salah satunya adalah serangan yang terjadi di Paris pada November 2015, kejadian tersebut dijadikan pemantik oleh *securitizing actors* bahwa dengan membiarkan mereka masuk maka sama saja membuka pintu bagi ancaman teroris yang semakin dekat. Akibatnya, pencari suaka asal Timur Tengah khususnya yang beragama Muslim dikonsepsikan sebagai subjek yang berbahaya dengan potensi kekerasan. Melalui *speech act*, *securitizing actors* berusaha meyakinkan masyarakat Polandia bahwa

menolak pencari suaka adalah langkah krusial demi mencegah datangnya serangkaian serangan teror di masa mendatang.

Securitizing actors membingkai kedatangan pencari suaka dalam jumlah besar sebagai ancaman identitas dan kohesi budaya Polandia. Dalam konteks ini, pencari suaka asal Timur Tengah digambarkan sebagai suatu entitas yang berbeda secara etnis dan agama yang membuat mereka tidak dapat berbaur dengan budaya setempat. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa para pencari suaka ini tidak memiliki intensi untuk membaur, bahkan tidak dapat untuk membaur pada kondisi sosial budaya yang ada di Polandia (Polko 2025). Dengan demikian pemerintah Polandia menyebut hal tersebut akan memicu *clash of cultures* yang mengancam homogenitas masyarakat Polandia. Polandia yang merupakan bangsa homogen di Eropa karena terdiri dari > 90% warganya merupakan etnis *Polish/Poles*, sehingga perbedaan budaya dan agama yang dibawa pencari suaka dapat mengganggu kehidupan sosial (Narkowicz 2018). Dengan retorika demikian, pencari suaka asal Timur Tengah digambarkan sebagai ancaman yang dapat menyebabkan disintegrasi budaya, mengikis nilai-nilai tradisional, dan mengancam identitas nasional.

Melalui penekanan ancaman terorisme dan disintegrasi sosial budaya *securitizing actors* berhasil membangun persepsi di kalangan masyarakat bahwa isu imigrasi merupakan *existential threat*. Imigran digambarkan akan mengancam keamanan dan tatanan kehidupan normal Polandia jika tidak ditangani. Dengan menggambarkan sebagai ancaman, *securitizing actors* memperoleh legitimasi publik untuk mengambil kebijakan tegas yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi normal.

3.4.2 *Emergency measure dan breaking free of rules*

Pada tahun 2015, setelah Uni Eropa menerapkan *Council Decision 2015/1601* yang berdasarkan *Treaty on the Functioning of the European Union* Pasal 78(3) untuk merelokasi 160.000 pencari suaka dari Italia dan Yunani ke negara-negara anggota, pemerintah Polandia secara tegas menolak kewajiban tersebut. Penolakan tersebut bukan sikap politik biasa, namun merupakan tindakan yang melampaui prosedur karena kebijakan relokasi tersebut bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota (European Council 2015).

Pemerintah Polandia tidak hanya menyatakan menolak kebijakan relokasi Uni Eropa, namun juga meningkatkan keamanan di perbatasannya secara signifikan. Dengan memperketat perbatasannya pemerintah Polandia juga menerapkan prosedur penerimaan suaka yang diperketat sesuai yang tertuang dalam amandemen *Alien Act (Dz.U. 2016 poz. 1954, Dz.U 2017 poz. 2206)* dan *Law on Protection for Foreigners (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176)*. Amandemen tersebut memperluas alasan penolakan permohonan suaka, mempercepat syarat deportasi, dan menambahkan daftar "*Safe third countries*" untuk menolak permohonan para pencari suaka (Global Detention Project 2018). Dengan perubahan hukum tersebut melancarkan Polandia dalam menolak ribuan pencari suaka tanpa pemeriksaan secara sungguh-sungguh.

Tindakan-tindakan tersebut juga semakin diperkuat dengan adanya kebijakan dari Parlemen Polandia. Pada 1 April 2016, Parlemen Polandia (Sejm) mengeluarkan resolusi yang menolak *Council Decision 2015/1601* yang berisikan bahwa Polandia tidak bersedia mematuhi keputusan relokasi Uni Eropa dengan menetapkan kepentingan nasional lebih tinggi dari kewajiban regional (Sejm 2016).

Selain menolak kebijakan relokasi Uni Eropa di tingkat eksternal, Polandia juga menerapkan *emergency measure* domestik yaitu UU Anti-Terrorisme Polandia 2016 yang kontroversial. Berdasarkan UU ini, seluruh warga asing yang terdapat di Polandia menjadi sasaran kecurigaan Pemerintah Polandia terkait dugaan akan adanya tindak terorisme. UU tersebut memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk memata-matai orang asing bahkan berlaku juga untuk warga negara anggota Uni Eropa (EDRi 2016). Melalui UU ini, Polandia secara efektif mengaitkan ancaman terorisme dengan kehadiran pencari suaka asing. Faktanya, implementasi UU anti-teror tersebut terutama menyasar komunitas Muslim, walaupun Polandia belum pernah mengalami serangan terorisme yang berlatar belakang Muslim, Polandia kerap menggunakan UU ini untuk menargetkan Muslim dengan bukti yang minim (Pikulicka-Wilczewska 2020).

Penolakan terhadap mekanisme relokasi Uni Eropa, pengetatan hukum suaka, dan penerapan UU Anti-Terrorisme 2016 merupakan bentuk nyata *emergency measures* yang merupakan tindakan yang diambil untuk mengatasi isu keamanan yang telah dikonstruksikan sebelumnya. Dengan menolak *Council Decision 2015/1601* yang bersifat mengikat pada anggota maka jelas Polandia melakukan *breaking free of rules*, di mana negara secara sengaja mengabaikan kewajiban regional untuk mengutamakan alasan kepentingan nasional.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya krisis pencari suaka yang melanda Uni Eropa pada tahun 2015, dengan arus terbesar berasal dari kawasan Timur Tengah. Meskipun Uni Eropa telah menetapkan kebijakan semangat solidaritas anggota untuk mendistribusikan beban pencari suaka secara merata, Polandia menempuh jalur yang sangat berbeda dengan menolak skema tersebut. Penolakan itu hadir dalam kemasan keamanan. Fenomena ini kemudian dikaji menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksi menjadi *existential threat* yang sah dan melegitimasi tindakan-tindakan negara.

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Polandia secara sistematis membingkai pencari suaka asal Timur Tengah sebagai *existential threat* terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, serta identitas budaya dan agama Katolik Polandia yang merupakan *referent object*. Hal ini ditunjukkan oleh *securitizing actors* yang merupakan aktor politik Polandia khususnya yang berasal dari partai PiS, melakukan *speech act* yang secara terang-terangan menyatakan bahwa imigran timur tengah adalah sebuah ancaman mulai dari terorisme, ekonomi, dan epidemi. Retorika tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk situasi yang bersifat darurat dan mengancam eksistensi negara.

Upaya sekuritisasi tersebut menunjukkan bahwa *securitizing actors* tidak berdiri sendiri, melainkan ada *functional actors* seperti organisasi masyarakat dan media-media konservatif yang ikut berkontribusi dalam membangun pandangan

buruk terhadap imigran Timur Tengah dengan menyebarkan ancaman secara luas dan masif. Sehingga menyebabkan perubahan drastis pada opini publik terhadap imigran Timur Tengah. Masyarakat Polandia yang sebelumnya memiliki pandangan relatif positif berubah menjadi sangat skeptis dan xenofobik. Sehingga menyetujui dan melegitimasi tindakan pemerintah yang merupakan *emergency measure* seperti menutup perbatasan, memperketat prosedur suaka, dan menerbitkan UU Anti-Terrorisme 2016 yang memperluas kewenangan aparat dalam mengawasi dan menindak warga asing. Serta tindakan Polandia menolak skema relokasi yang ditetapkan Uni Eropa untuk menerima 7.000 pencari suaka merupakan *breaking free of rules*.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sekuritisasi benar terjadi dan berhasil. Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde, yaitu adanya *speech act* yang mengkonstruksikan imigran sebagai *eksistential threat* terhadap *referent object* berupa keamanan nasional dan identitas sosial Polandia, *securitizing actors* yang merupakan pemerintah dan tokoh politik Polandia, serta pembingkai ancaman yang diterima publik terlihat dari reaksi masyarakat yang terpolarisasi dengan mayoritas memiliki stereotip buruk terhadap imigran. Keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan ditunjukkan melalui legitimasi politik untuk menerapkan *emergency measures* berupa kebijakan pembatasan masuk dan penolakan relokasi terhadap pencari suaka, serta *breaking free of rules* dengan mengambil langkah di luar prosedur politik Uni Eropa.

4.2 Rekomendasi

Selama proses penelitian ini berlangsung, penulis mengalami sejumlah hambatan dalam memperoleh data yang relevan. Salah satunya adalah keterbatasan

akses yang berasal langsung dari pemerintah Polandia atau aktor terkait. Kendala bahasa juga menjadi hambatan akibat minimnya ketersediaan sumber dengan bahasa yang familiar yaitu bahasa Inggris yang secara spesifik membahas situasi di Polandia. Sebagian besar literatur berasal dari sumber berbahasa Polandia. Selain bahasa, meskipun penelitian ini belum banyak yang membahasnya di Indonesia, tetapi tahun dijadikan pertimbangan. Banyak sumber yang sudah tidak dapat diakses dan harus melalui cara lain.

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas dan menemukan cakupan data yang lebih luas lagi. Terkait permasalahan bahasa penulis menyarankan penggunaan alat penerjemah yang kredibel agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi dan bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. 2015. Poland's President Warns of Refugees Bringing Epidemics. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2015/10/18/polands-president-warns-of-refugees-bringing-epidemics#:~:text=Duda%20told%20the%20TVN24%20channel,as%20well%20as%20their%20health>.
- Al Jazeera. 2019. Polish MP: "For me, multiculturalism is not a value" | UpFront (Headliner). <https://www.youtube.com/watch?v=ccOp0I8ZPho>.
- Aljazeera. 2017. Thousands of nationalists, fascists march in Warsaw. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2017/11/12/thousands-of-nationalists-fascists-march-in-warsaw#:~:text=The%20rally%E2%80%99s%20popularity%20demonstrates%20the,within%20the%20Poland%E2%80%99s%20divided%20society>.
- Annabele Chapman. 2016. Poland quibbles over who's a refugee and who's a migrant. *Politico*. <https://politico.eu/article/poland-quibbles-over-whos-a-refugee-and-whos-a-migrant-beata-szydlo-asylum-schengen>.
- Annika Morath. 2017. "Poland for the Polish" ? Taking a Closer Look at the Polish Rejection of Refugees. *Heinrich Böll Stiftung*. <https://eu.boell.org/en/2017/06/14/poland-polish-taking-closer-look-polish-rejection-refugees#:~:text=two%20years%3A%20In%20May%202015%2C,has%20tritionally%20been%20an%20emigration>.
- Associated Press. 2015. 150 Syrian Christian refugees arrive in Poland. *The Times of Israel*. <https://www.timesofisrael.com/150-syrian-christian-refugees-arrive-in-poland/>.
- Bart Bachman. 2016. Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis. *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis>.
- BBC. 2016. Polish media laws: Government takes control of state media. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-35257105>.
- Broomfield, Matt. 2016. Poland Refuses to Take a Single Refugee Because of "security" FearsBr. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-refuses-to-take-a-single-refugee-because-of-security-fears-a7020076.html>.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap De Wilde. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. London: LYNNE RIENNER PUBLISHER.
- Ciensi, Jan. 2016. Poland Slams Door on Refugees. *POLITICO*. <https://www.politico.eu/article/poland-slams-door-on-refugees-beata-szydlo/>.
- Ciobanu, Claudia. 2017. Poland follows Hungary's footsteps in corralling migrants. *POLITICO*, April. <https://www.politico.eu/article/refugees-europe-poland-follows-hungarys-footsteps-in-corralling-migrants/#:~:text=The%20idea%20is%20popular%20politically,figure%20was%20almost%2090%20percent>.
- CNBC. 2015. Poland tells EU: No more migrants without security assurances. *CNBC.COM*. <https://www.cnbc.com/2015/11/14/poland-tells-eu-no-more-migrants-without-security-assurances.html>.

- Costello, Cathryn, Elspeth Guild, dan Violeta Moreno-Lax. 2017. *Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece STUDY*.
- Damien Sharkov. 2016. Poland Rejects Plans to Take in More Refugees After Brussels Attacks. *Newsweek*. <https://www.newsweek.com/poland-rejects-more-refugees-after-brussels-attacks-440340?utm>.
- Deloy, Corinne. 2015. *The Law and Justice Party win the parliamentary elections and the absolute majority European Elections monitor*. <http://www1.parlamentarny.pl/>.
- Denny Armandhanu. 2016. Polandia Membangkang Uni Eropa, Tolak Terima Pengungsi. *www.cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi>.
- DW. 2016. Poland says no to refugees after terrorist attacks. *DW*. <https://www.dw.com/en/poland-abandons-promise-to-take-in-refugees-after-brussels-attacks/a-19137258#:~:text=migrants%20into%20Europe%2C>.
- EDRi. 2016. Poland adopted a controversial anti-terrorism law. *EDRi*. <https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/#:~:text=On%2022%20June%2C%20the%20Polish,The%20Polish%20EDRi%20member>.
- Euronews. 2015. Poland and refugees. Where is the Solidarity? *Euronews*. <https://www.euronews.com/my-europe/2015/10/23/poland-and-refugees-where-is-the-solidarity>.
- Euronews. 2018. Poland refuses Middle Eastern migrants. *Euronews*. <https://www.euronews.com/2018/01/02/poland-refuses-mid-east-migrants?>
- European Council. 2015. *COUNCIL DECISION (EU) 2015/ 1601 - of 22 September 2015 - Establishing Provisional Measures in the Area of International Protection for the Benefit of Italy and Greece*.
- Eurostat. 2015. *Asylum in the EU The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014 20% were Syrians*.
- Eurostat. 2016. *Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015*.
- Fordoński, Arkadiusz Łukasz, dan Arkadiusz Lewandowski. 2019. Polish Media Debate on the Migration Crisis. The Case of Opinion-Forming Media. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia* 26 (2). Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:139. doi:10.17951/k.2019.26.2.139-157.
- Global Detention Project. 2018. *Country Report Immigration Detention In Poland: Systematic Family Detention And Lack Of Individualised Assessment*. Geneva. www.globaldetentionproject.org.
- Gozdziak, Elzbieta M. 2018. Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti-Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland. doi:10.17467/ceemr.2018.04.
- Hanna Azarya Samosir. 2015. Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah? . *www.cnnindonesia.com*.

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah>.
- Hargrave, Karen, dan Sarian Jarosz. 2023. Is anti-migrant rhetoric still a vote-winner? Unpacking narratives in Poland's election. *ODI Global*. <https://odi.org/en/insights/is-anti-migrant-rhetoric-still-a-vote-winner-unpacking-narratives-in-polands-election/#:~:text=In%20Poland%E2%80%99s%202015%20parliamentary%20elections,home%20in%20our%20own%20country%3F%E2%80%99>.
- Ivan martin. 2017. Polish Minister on migrant sharing: we are not a camp. *Times of Malta*. <https://timesofmalta.com/article/polish-minister-on-migrant-sharing-we-are-not-a-camp.647003#:~:text=He%20said%3A%20%E2%80%9CYou%20simply%20must,%E2%80%9D>.
- Jack Sommers. 2016. Polish Magazine wSieci's "Islamic Rape Of Europe" Compared To Nazi And Fascist Propaganda. *The Huffington Post UK*. https://www.huffingtonpost.co.uk/2016/02/19/polish-magazine-wsieci-cover_n_9271074.html.
- Jan Cienski. 2015. Migrants carry "parasites and protozoa," warns Polish opposition leader. *POLITICO*. <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/#:~:text=In%20earlier%20comments%20made%20in,%E2%80%9D>.
- Jan Cienski. 2017. Why Poland doesn't want refugees. *POLITICO*. <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>.
- Jarecka-Stepień, Katarzyna. 2010. *Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Haziran 2010 Cilt: 1 Sayı: 1 Die Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien Muslims in Poland: Tatars, Refugees and Immigrants. Electronic Journal of Political Science Studies*. Vol. 1. www.stat.gov.pl/serwis/polska/2003/rocznik4relig.htm.
- Jaskułowski, Krzysztof. 2018. *The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland Between Nationalism, Fear and Empathy*.
- Jennifer Rankin. 2020. EU court rules three member states broke law over refugee quotas. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/law/2020/apr/02/eu-court-rules-three-countries-czech-republic-hungary-poland-broke-law-over-refugee-quotas>.
- Jo Harper. 2018. Poland fears economic hit as EU opens door to Ukrainians. *dw.com*. <https://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-eu-opens-door-to-ukrainians/a-42367764>.
- Kaczmarzyk, Paweł. 2014. *Recent Trends in International Migration in Poland The 2012 SOPEMI Report PAWEŁ KACZMARCZYK*. www.migracje.uw.edu.pl.
- Kaczorowski, Paweł, Dorota Szałytyś, Zofia Kostrzewa, Agnieszka Dobrzyńska, Małgorzata Potocł, Małgorzata Cierniak-Piotrowska, dan Agata Franecka. 2020. *Demographic situation in Poland up to 2019*. Warsaw.
- Kowalski, M. 2016. From a Different Angle—Poland and the Mediterranean Refugee Crisis.

- Lydia Kelly. 2017. Polish PM comes under fire for appearing to defend anti-migrant policy at Auschwitz. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/article/world/polish-pm-comes-under-fire-for-appearing-to-defend-anti-migrant-policy-at-auschw-idUSKBN1952U8/>
- Mandhai, Shafik. 2017. How big an issue is Islamophobia in Poland. *Aljazeera*.
<https://www.aljazeera.com/news/2017/11/14/how-big-an-issue-is-islamophobia-in-poland#:~:text=Fears%20of%20Islam%20and%20an,the%20Cracow%20University%20of%20Economics>.
- Matthew Taylor. 2017. “White Europe”: 60,000 nationalists march on Poland’s independence day. *The Guardian*.
- Narkowicz, Kasia. 2018. “Refugees Not Welcome Here”: State, Church and Civil Society Responses to the Refugees Crisis in Poland. *International Journal of Politics, Culture and Society* 31 (4):357–373.
- Natalia Ojewska. 2015a. Poland’s modest refugee policy proves controversial. *AlJazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2015/11/9/polands-modest-refugee-policy-proves-controversial#:~:text=Poland%E2%80%99s%20religious%20and%20ethnic%20homogeneity,Poles%20identifying%20with%20the%20religion>.
- Natalia Ojewska. 2015b. A “witch-hunt” for Poland’s barely visible refugees. *ALJAZEERA*. <https://www.aljazeera.com/features/2015/12/3/a-witch-hunt-for-polands-barely-visible-refugees#:~:text=Thousands%20of%20people%20have%20taken,like%20the%20National%20Radical%20Camp>.
- Official Journal of the European Communities*. 2000. Charter Of Fundamental Rights Of the European Union.
- Onet.pl. 2016. Poles to the right of Jarosław Kaczyński. *Onet.pl*.
<https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ruchy-skrajnie-prawicowe-moga-stac-sieryalami-pis/9wzdy4>.
- Pikulicka-Wilczewska, Agnieszka. 2020. Deporting Muslim Immigrants Won’t Make Poland Safer. *Foreign Policy*.
<https://foreignpolicy.com/2020/10/19/deport-muslim-immigrants-poland-counterterrorism-pis-islamist-radicalization/#:~:text=In%20addition%20to%20raising%20concerns,free%20hand%20to%20pursue%20foreign>.
- Polko, Paulina. 2025. Just and unjust securitization of migration: a comparative analysis of migration to Poland from MENA countries and Ukraine. *Frontiers in Political Science* 7. Frontiers Media SA.
doi:10.3389/fpos.2025.1464288.
- Reuters. 2015a. Poland says cannot take migrants under EU quotas without guarantees after Paris attacks. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/article/world/poland-says-cannot-take-migrants-under-eu-quotas-without-guarantees-after-paris-idUSKCN0T30P9/>.
- Reuters. 2015b. Polish PM says refugee crisis can’t be “exported” within EU. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/world/polish-pm-says-refugee-crisis-cant-be-exported-within-eu-idUSKCN0T71HO/?utm>.
- Reuters. 2017. Poland wants option to detain migrants in camps: minister. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/world/poland-wants-option-to>

- detain-migrants-in-camps-minister-idUSKBN17F1I1/#:~:text=,that%20could%20sweep%20across%20Poland. Sejm. 2016. *Resolution Of The SEJM Of The Republic Of Poland*.
- Troszyński, Marek, dan Magdalena El-Ghamari. 2022. A Great Divide: Polish media discourse on migration, 2015–2018. *Humanities and Social Sciences Communications* 9 (1). Springer Nature. doi:10.1057/s41599-021-01027-x.
- Uchodzczy. 2025. REFUGEES IN POLAND: HISTORY. *Uchodzczy.info*. Diakses Juni 19. <https://uchodzczy.info/infos/historia/>.
- UNHCR. 1961. *The 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html>.
- UNHCR. 2006. *Master Glossary Of Terms Rev. 1 Status Determination And Protection Information Section Division Of International Protection Services United Nations High Commissioner for Refugees*. <http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=572>.
- Vanessa Gera. 2017. Polish far-right march goes global, drawing people from afar. *APNEWS*. <https://web.archive.org/web/20171113020435/https://apnews.com/7c92733db6f04e8ea912808ecc4837e6>.
- Williamson, Hugh. 2015. Dispatches: Welcoming Voices from Poland on Refugees. *Human Right Watch*. <https://www.hrw.org/news/2015/10/15/dispatches-welcoming-voices-poland-refugees#:~:text=Refugees%20are%20welcome%20in%20Poland,helping%20solve%20Europe%E2%80%99s%20refugee%20crisis>.
- Wintour, Patrick. 2017. EU takes action against eastern states for refusing to take refugees. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-refusing-to-take-refugees#:~:text=The%20Euro sceptic%20governments%20in%20Poland,it%20would%20not%20welcome%20more>.
- Wprost. 2016. Adam Smith Centre poll: 64% of Poles want to close borders to refugees. *Wprost*. <https://www.wprost.pl/kraj/534454/sondaz-centrum-im-adama-smitha-64-proc-polakow-chce-zamknienia-granic-przed-uchodzcami.html>.
- Ziolek-Skrzypczak, Magdalena, dan Krystyna Iglicka. 2010. EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges. *Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges>.